

LAPORAN KINERJA TAHUN 2023

DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN INSPEKTORAT DAERAH

Jln.Pahlawan No. 1 Palnan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Telepon (0756) 21601/ Fax. (0756) 21601

Laman: <https://inspekda.pesisirselatankab.go.id> Pos-el: inspektoratpessel@yahoo.co.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Perikanan dan Pangan untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi Informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu Kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam menyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Palnan, 7 Maret 2024



Rusdiyanto, S.H., M.Hum.
Pembina Utama Muda

NIP. 19641112 199203 1 008

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 telah dapat diselesaikan. Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan menyajikan hasil pelaksanaan program/kegiatan Perikanan dan Pangan pada tahun 2023 dan merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Renstra Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Periode 2021-2026.

Program/kegiatan Perikanan dan pangan yang dilaksanakan selama tahun 2023 adalah upaya peningkatan pendapatan dan terciptanya Perikanan dan Pangan secara umum mencapai sasaran, namun demikian berbagai kendala masih menghambat pelaksanaan beberapa program/kegiatan sesuai sasaran yang diinginkan, hal ini kedepan tentu membutuhkan pemikiran lebih lanjut dalam pemecahan, serta melakukan perbaikan dan penajaman renstra, program dan kegiatan pada periode berikutnya.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini masih banyak kekurangannya, namun demikian laporan ini akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun berikutnya.

Painan, Januari 2024
Kepala Dinas Perikanan dan Pangan
Kabupaten Pesisir Selatan



EIRDAUS S.Pi.
NIP. 19700621 199303 1 006

IKHTISAR EKSEKUTIF

Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan adalah “Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju, dan Bermartabat didukung Pemerintahan yang akuntabel dan Profesional”. Dalam pencapaian visi ini, Dinas Perikanan dan Pangan berperan dalam pencapaian misi yang ke tiga yaitu Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Pada tahun 2023 adalah Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat dan Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi secara Berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan Dinas Perikanan dan Pangan, ada 4 (empat) sasaran yaitu :

1. Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja
2. Meningkatkan Kualitas Inovasi Daerah
3. Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin
4. Meningkatnya Daya Saing Sektor Unggulan

Hasil analisis dan evaluasi dari capaian indikator kinerja sasaran strategis yang telah diukur dalam Bab III, keberhasilan/kegagalan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan misi yang diemban dapat dilihat dari capaian indikator kinerja tahun 2023, sebagai berikut :

1. Nilai AKIP Perangkat Daerah
2. Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah
3. Pencapaian Skor PPH (Pola Pangan Harapan)
4. Nilai Tambah Produksi Hasil Perikanan

Pencapaian kinerja untuk 4 (empat) sasaran strategis dan 4 (empat) indikator kinerja yang terdapat pada masing - masing misi adalah sebesar 93,10%. Berdasarkan klasifikasi penilaian keberhasilan/ kegagalan yang ditetapkan termasuk kategori *sangat baik* dengan rincian capaian indikator kinerja per sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel Capaian Kinerja Tahun 2023

No	Misi/Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
Misi 1: Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan					
Tujuan 1 : Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi					
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A	A (80,97)	100
2	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi PD	100	63	63
Misi 2: Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat					
Tujuan 1 : Meningkatkan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat					
1.	Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin	Pencapaian Skor (PPH) Pola Pangan Harapan	82	88,9	108,41
Misi 3: Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah					
Tujuan 1 : Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Secara Berkelanjutan					
1.	Meningkatnya Daya Saing Sektor Unggulan	Nilai tambah produk hasil perikanan (Rupiah)	Rp. 85.885.000.000	Rp. 86.735.261.500	100,99
	Rata-rata capaian				93,10

DAFTAR HADIR

IKHTIAR EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	5
1.3. Gambaran Organisasi	5
1.3.1 Kedudukan	5
1.3.2 Tugas Pokok dan Fungsi	6
1.3.3 Struktur Organisasi	6
1.3.4 Sumber Daya Manusia	14
1.4. Aspek Strategis Organisasi	17
1.5. Permasalahan Utama (Strategic Issued)	18
1.5.1 Identifikasi Permasalahan	18
1.5.2 Hambatan/Kendala	19
1.5.3 Penentuan Isu-Isu Strategis	20
1.5.4 Sistematika Penyajian	30
BAB II PERENCANAAN KINERJA	33
2.1 RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026.....	33
2.2 Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026	35
2.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)	36
2.2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	38
2.3 Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023	38
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	41
3.1 Metode Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi	41
3.2 Hasil Pengukuran Kinerja	42
3.3 Analisa dan Evaluasi Capaian Kinerja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan	43
3.3.1 Hasil Pengukuran Sasaran Strategis pada Target RPJMD Tahun 2021-2026	43
3.3.2 Perbandingan dengan Standar Nasional	64
3.4 Realisasi Anggaran	86
BAB IV PENUTUP	87
4.1 Kesimpulan ..	87
4.2 Saran	88

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Jumlah Pegawai Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023	15
Tabel 1.2.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	16
Tabel 1.3.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	17
Tabel 1.4.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan	17
Tabel 2.1.	Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator	35
Tabel 2.2.	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026.....	32
Tabel 2.3.	Rencana Kinerja Tahunan 2023 Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan	38
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan	39
Tabel 2.5	Program dan Anggaran Tahun 2023 Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan	40
Tabel 3.1.	Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023	42
Tabel 3.2.	Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022	42
Tabel 3.3.	Nilai AKIP Dinas Perikanan dan Pangan Tahun 2023	36
Tabel 3.4.	Nilai Kematangan Inovasi Dinas Perikanan dan Pangan Tahun 2023	44
Tabel 3.5.	Capaian Tingkat Konsumsi Pangan Tahun 2023	45
Tabel 3.6.	Perbandingan Capaian Tingkat Konsumsi Pangan Tahun 2022 dan 2023	46
Tabel 3.7.	Perkembangan Tingkat Konsumsi Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2023	46
Tabel 3.8.	Perbandingan Skor PPH Kabupatenn Pesisir Selatan dengan Skor Maksimum PPH (Tahun 2020-2023)	48
Tabel 3.9	Hasil Pengukuran antara Realisasi, Target Kinerja dan Indikator Kinerja Sasaran 3	50
Tabel 3.10	Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja tahun sebelumnya Tahun 2020 s/d 2023	50
Tabel 3.11	Program Kegiatan yang Mendukung Sasaran Strategis 3	52
Tabel 3.12	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Propinsi dan Nasional ..	64
Tabel 3.13	Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan Tahun 2023.....	65
Tabel 3.14	Hasil Pengukuran antara Realisasi, Target Kinerja dan Indikator Kinerja Sasaran 4	65
Tabel 3.15	Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Capaian kinerja tahun sebelumnya Tahun 2020 s/d 2023	66
Tabel 3.16	Capaian Indikator Kinerja Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan Tahun 2022 s/d 2023	66
Tabel 3.17	Program Kegiatan yang Mendukung Sasaran Strategis 3	67

Tabel 3.18	Jumlah Produksi Perikanan Tahun 2023	68
Tabel 3.19	Capaian Indikator Kinerja Jumlah Produksi Perikanan Tahun 2022 dan 2023	68
Tabel 3.20	Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Capaian kinerja tahun sebelumnya Tahun 2020 s/d 2023	69
Tabel 3.21	Perbandingan Realisasi kinerja dengan propinsi dan Nasional...	85
Tabel 3.22.	Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Yang Menunjang Sasaran Strategis	85

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan perikanan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tiga pilar pembangunan, yaitu pengentasan kemiskinan, pro-job penyerapan tenaga kerja, dan pertumbuhan. Secara fisik Kabupaten Pesisir Selatan terdapat disepanjang pantai dengan panjang garis pantai ± 234,2 Km yang memiliki 47 buah pulau kecil. Kondisi wilayah yang demikian mengandung sumberdaya alam yang sangat besar baik sumberdaya yang tidak dapat pulih maupun sumberdaya yang dapat pulih dan mempunyai potensi ekonomi yang besar sepanjang dapat mengelolanya dengan tepat. Sementara itu ketersediaan sumberdaya alam yang ada di daratan semakin terbatas, khususnya yang berbasis lahan sejalan dengan bertambahnya penduduk dan berkembangnya kegiatan ekonomi sebagai dampak dari pelaksanaan pembangunan.

Dengan garis pantai ± 234,2 Km jelas mempunyai potensi yang sangat besar untuk budidaya laut dan budidaya air payau, yang saat ini masih terbatas pemanfaatannya. Potensi pengembangan budidaya perikanan semakin besar jika dimanfaatkan pula keberadaan lahan dan perairan tawar yang besar juga potensinya.

Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) terus mendorong peningkatan keberagaman konsumsi pangan masyarakat. Upaya tersebut salah satunya dilakukan dengan menerbitkan Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pola Pangan Harapan. diterbitkannya Perbadan tentang Pola Pangan Harapan (PPH) bertujuan untuk memperkuat Ketahanan Pangan Nasional yang mengedepankan keberagaman konsumsi pangan dan keterpenuhan gizi Masyarakat. Hal ini erat kaitannya dengan konsumsi pangan yang berkualitas, sehingga memenuhi angka kecukupan gizi dan energi. Selain itu, keberagaman konsumsi dapat menekan ketergantungan terhadap

komoditas pangan tertentu, khususnya komoditas pangan yang masih mengandalkan impor,

Sembilan kelompok pangan PPH meliputi padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, buah/biji berminyak, minyak dan lemak, kacang-kacangan, gula, sayuran dan buah, dan aneka bumbu dan bahan minuman, kesembilan kelompok pangan tersebut merepresentasikan 3 kelompok fungsi pangan bagi tubuh, yaitu sebagai sumber karbohidrat atau tenaga (padi-padian, umbi-umbian, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, dan gula), sumber protein atau zat pembangun (pangan hewani dan kacang-kacangan), serta sumber vitamin dan mineral atau zat pengatur (sayuran dan buah).

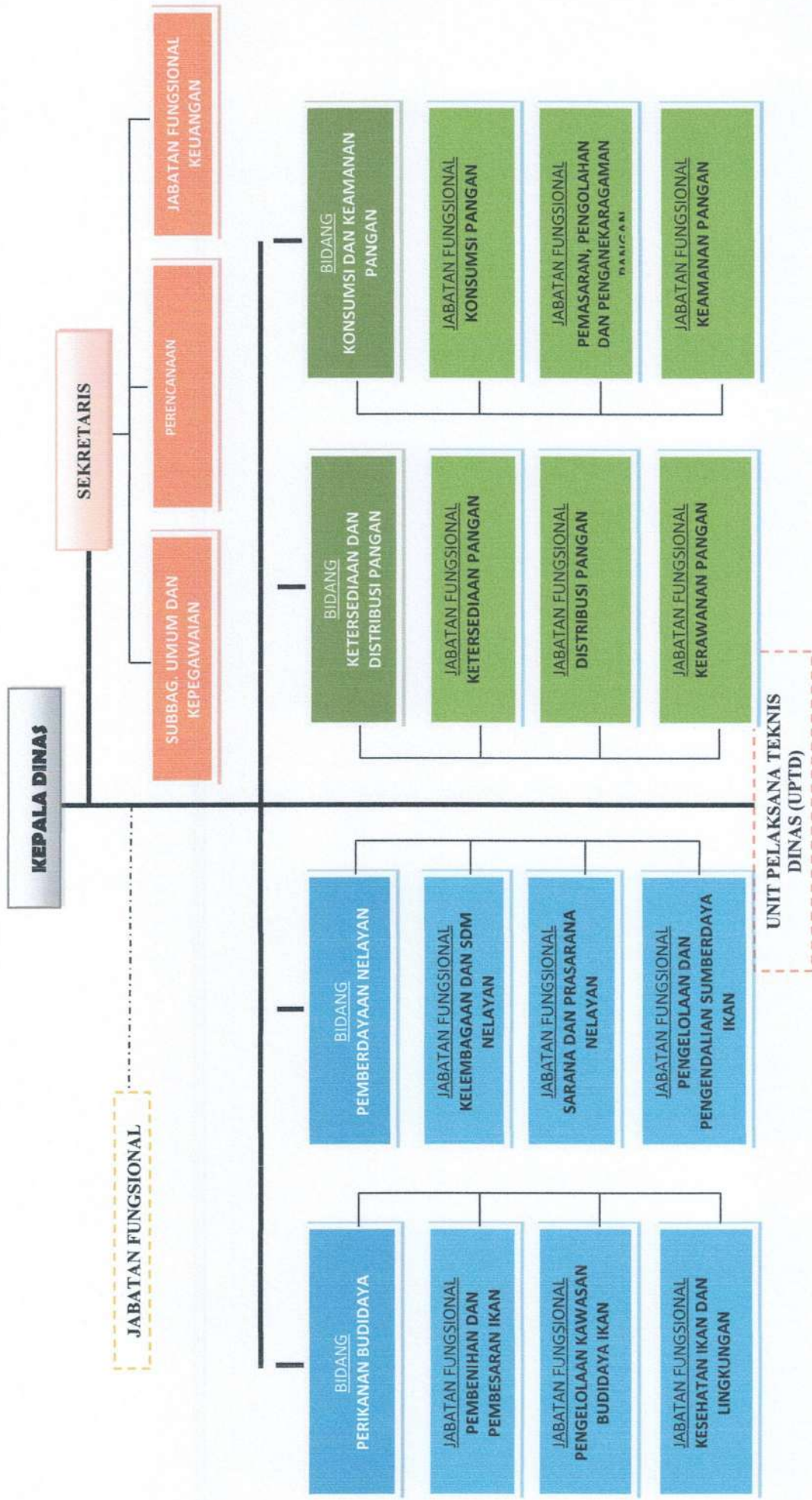
Untuk target skor PPH Nasional mengacu pada RPJMN dan usulan dari Badan Pangan Nasional. Sedangkan untuk skor PPH Daerah mengacu pada RPJMD, target nasional, dan usulan Badan Pangan Nasional. Sementara itu, target skor PPH nasional pada tahun 2023 adalah 94,0 dan target 2024 adalah 95,2 dari skor PPH ideal 100. "Diharapkan dengan Perbadan tentang PPH ini dapat dilakukan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat termasuk juga pengentasan daerah rentan rawan pangan dan gizi serta pengurangan *stunting*. Saat ini yang pasti Pemerintah semakin serius terhadap gerakan penganekaragaman konsumsi pangan untuk pemenuhan gizi masyarakat,"

Pembangunan Ketahanan Pangan merupakan prioritas daerah dalam RPJMD 2021-2026 yang difokuskan pada peningkatan ketersediaan pangan, pemantapan distribusi pangan, serta percepatan penganekaragaman pangan sesuai karakteristik daerah. Pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan melalui upaya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan sebagai perwujudan pembangunan sosial-ekonomi sebagai bagian pembangunan secara keseluruhan. Sebagaimana diketahui, ketahanan pangan didefinisikan sebagai terpenuhinya kebutuhan pangan bagi setiap individu sepanjang waktu untuk dapat hidup sehat dan aktif beraktifitas, mencakup aspek ketersediaan, distribusi, keterjangkauan (fisik dan ekonomi) dan dimensi waktu.

Untuk mewujudkan pembangunan perikanan dan ketahanan pangan daerah maka Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan membentuk Dinas Perikanan dan Pangan

Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah merupakan perangkat daerah di bidang pangan yang dipimpin oleh Kepala Dinas pejabat Eselon II.b yaitu Firdaus, S.Pi. yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sebagai evaluasi kinerja satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, maka disusunlah Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2023 atas dasar kinerja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan. Penyusunan evaluasi kinerja ini bertujuan untuk memberikan penilaian terhadap kemampuan satuan kerja Dinas Perikanan dan Pangan dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang Perikanan dan Pangan serta sejauh mana pelaksanaan program/kegiatan itu mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERIKANAN DAN PANGAN (Berdasarkan Peraturan Daerah No. 166 Tahun 2021)



1.2 Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran tahun 2023. Adapun maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 mencakup hal sebagai berikut:

1. *Aspek Akuntabilitas Kinerja* : bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LKjIP 2023 sebagai sarana pertanggungjawaban Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2023. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi, tujuan dan sasaran strategia yang telah dicapai selama tahun 2023.
2. *Aspek Manajemen Kinerja* : bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LKjIP 2023 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa datang.

1.3 Gambaran Organisasi

1.3.1 Kedudukan

Kedudukan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan adalah untuk mewujudkan pembangunan perikanan dan ketahanan pangan daerah maka Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan membentuk Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah merupakan perangkat daerah di bidang pangan yang dipimpin oleh Kepala Dinas pejabat Eselon II.b. yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1.3.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang perikanan dan pangan

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup Dinas;
- b. Pelaksana kebijakan sesuai dengan lingkup Dinas;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup Dinas;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.3.3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 166 Tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan dan Pangan. Struktur organisasi pada Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, sebagai berikut:

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang perikanan dan pangan. Dinas Perikanan dan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup Dinas;
2. Pelaksana kebijakan sesuai dengan lingkup Dinas;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup Dinas;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

B. Sekretariat

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum kepegawaian, pengkoordinasian perencanaan, pengelolaan keuangan, dan pelaporan Dinas. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretaris menyelenggarakan fungsi:

1. Pengkoordinasian penyusunan rencana, program, anggaran di bidang perikanan dan pangan;
2. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi urusan perikanan dan pangan;
3. Penyelenggara administrasi kesekretariatan, pengelolaan dan pengendalian administrasi keuangan di lingkungan Dinas;
4. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
5. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
6. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Sekretariat terdiri dari :

(a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melakukan urusan persuratan, kearsipan, urusan administrasi Aparatur Sipil Negara, urusan perlengkapan, rumah tangga dan penataan barang milik negara di lingkungan Dinas Perikanan dan Pangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan di sub bagian umum dan kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. menginventarisasi dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan urusan umum dan kepegawaian, pengelolaan rumah tangga Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas, serta menyiapkan petunjuk pemecahan masalah;
3. mengonsep rencana kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian berdasarkan tugas dan fungsi, serta sumber daya yang ada berpedoman kepada Renstra Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
4. mempersiapkan penyelenggaraan rapat-rapat Dinas, pertemuan dan acara rutin keprotokolan, dan acara resmi lainnya;
5. mengendalikan surat masuk, surat keluar, dan mengarsipkan;
6. merencanakan kebutuhan barang dan perlengkapan serta melaksanakan pengendalian administrasi barang dan perlengkapan;
7. menyiapkan bahan pelaksanaan pengadaan, penyaluran, pemakaian, penggunaan, dan penghapusan barang dan perlengkapan;
8. menyiapkan administrasi pengaturan urusan rumah tangga, keamanan kantor, dan lingkungan;
9. mengatur pelaksanaan penggunaan dan pemakaian barang inventaris dan perlengkapan;
10. mengumpulkan, mengelola, dan menyiapkan data kepegawaian dilingkup Dinas;
11. menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, dan gaji berkala pegawai dilingkup Dinas;
12. menyiapkan bahan usulan Karis, Karsu, Askes, dan lain-lain dilingkup

Dinas;

13. menyiapkan bahan mutasi, teguran pelanggaran disiplin, pensiun, dan surat cuti pegawai dilingkup Dinas;
14. menyiapkan absensi kehadiran pegawai dan mengkoordinir kehadiran pegawai dilingkup Dinas;
15. membuat laporan kepegawaian dan Daftar Urut Kepangkatan dan menyusun Bezzeting dilingkup Dinas;
16. membagi tugas atau kegiatan serta memberi petunjuk, bimbingan dan arahan, membina, mengevaluasi, mengawasi, dan menilai pelaksanaan tugas bawahan; dan
17. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

(b) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan dan Pelaporan
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas merencanakan, mengolah, menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana dan pelaporan di lingkungan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(c) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keuangan

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keuangan mempunyai tugas merencanakan, menyiapkan bahan, menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas serta pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Bidang Perikanan Budi Daya

Bidang Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas menyiapkan koordinasi, fasilitasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan pembudidayaan ikan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perikanan Budidaya menyelenggarakan fungsi :

1. Melaksanakan penyiapan kebijakan pengelolaan pembudidayaan ikan;
2. Melaksanakan pengawasan pengelolaan pembudidayaan ikan;
3. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pengelolaan pembudidayaan ikan; dan
4. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

Bidang Perikanan Budidaya terdiri dari :

- (a) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembenihan dan Pembesaran Ikan

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembenihan dan Pembesaran Ikan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, serta pelaporan pembenihan dan pembesaran ikan.

- (b) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengelolaan Kawasan Budidaya Ikan

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengelolaan Kawasan Budidaya Ikan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan kawasan budidaya perikanan.

- (c) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesehatan Ikan dan Lingkungan

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesehatan Ikan dan Lingkungan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi

serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan air dan lahan untuk pembudidaya ikan, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, serta pembinaan mutu pakan ikan dan obat ikan yang digunakan pembudidaya ikan.

D. Bidang Pemberdayaan Nelayan

Bidang Pemberdayaan Nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan pemberdayaan nelayan. Untuk melaksanakan tugas Bidang Pemberdayaan Nelayan memiliki fungsi:

1. Pelaksanaan penyiapan kebijakan pemberdayaan nelayan;
2. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan nelayan; dan
3. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

Bidang Pemberdayaan Nelayan terdiri dari :

(a) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Nelayan

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Nelayan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pembinaan kelembagaan, pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan pembinaan kepada nelayan.

(b) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sarana dan Prasarana Nelayan

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sarana dan Prasarana Nelayan mempunyai tugas mengumpulkan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, serta

pelaporan pelaksanaan fasilitasi kemitraan usaha, pemberian kemudahan dalam peningkatan sarana dan prasarana nelayan.

- (c) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengelolaan dan Pengendalian Sumber Daya Ikan.

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengelolaan dan Pengendalian Sumber Daya Ikan mempunyai tugas mengumpulkan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian sumber daya ikan.

E. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

Bidang Ketersediaan dan Distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas menyusun bahan kebijakan dan perencanaan operasional serta melaksanakan program dan kegiatan Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan menyelenggarakan fungsi :

1. penyiapan pelaksanaan koordinasi di Bidang Ketersediaan Pangan dan Distribusi Pangan;
2. perumusan bahan perencanaan operasional program dan kegiatan penyelenggaraan urusan di Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
3. penyiapan pelaksanaan kebijakan di Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
4. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
5. penyiapan pemantapan program di Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
6. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Bidang

Ketersediaan dan Distribusi Pangan; dan

7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Distribusi dan Ketersediaan Pangan, terdiri dari :

- (a) **Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Ketersediaan Pangan**
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Ketersediaan Pangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Ketersediaan Pangan.
- (b) **Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Distribusi Pangan**
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Distribusi Pangan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengoordinasikan, dan evaluasi Distribusi Pangan.
- (c) **Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kerawanan Pangan**
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kerawanan Pangan mempunyai tugas merencanakan, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan terkait dengan kerawanan pangan.

F. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pengkajian, penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Konsumsi dan Keamanan Pangan. Untuk melaksanakan tugas Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

1. pengkajian konsumsi, penganekaragaman, pengolahan, keamanan serta pemasaran hasil pangan;
2. penyiapan perumusan kebijakan konsumsi, penganekaragaman,

- pengolahan, keamanan, serta pemasaran hasil pangan;
3. pelaksanaan kebijakan konsumsi, penganekaragaman, pengolahan, keamanan, serta pemasaran hasil pangan;
 4. pelaksanaan pembinaan konsumsi pangan, penganekaragaman, pengolahan, keamanan, serta pemasaran hasil pangan;
 5. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria konsumsi, penganekaragaman, pengolahan, keamanan, serta pemasaran hasil pangan;
 6. pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pembinaan terhadap pola konsumsi, penganekaragaman, pengolahan, keamanan, serta pemasaran hasil pangan; dan
 7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan terdiri dari :

(a) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Konsumsi Pangan

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Konsumsi Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi konsumsi pangan.

(b) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemasaran, Pengolahan, dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemasaran, Pengolahan, dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi kegiatan pemasaran, pengolahan, dan penganekaragaman konsumsi pangan.

(c) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keamanan Pangan

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan keamanan pangan.

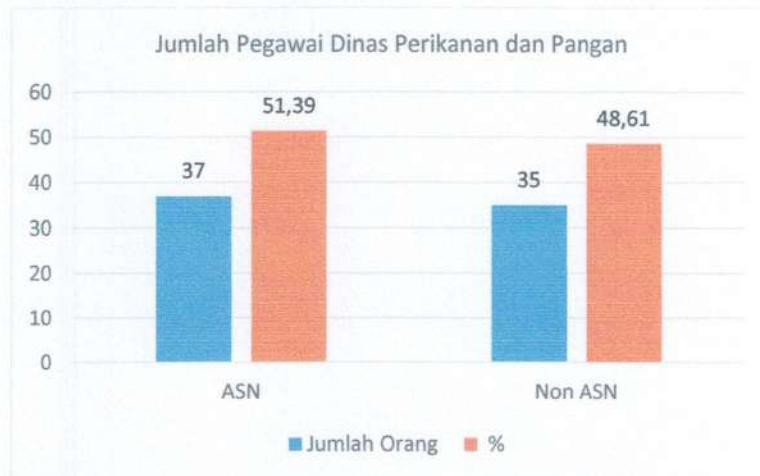
1.3.4 Sumber Daya Manusia

Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan memiliki SDM yang beragam. Jumlah SDM Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2023 sebanyak 72 orang, terdiri dari 37 orang ASN dan 35 orang Tenaga Honorer (Non ASN).

Tabel 1.1
Jumlah pegawai Dinas Perikanan dan Pangan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023

No	Status PNS	Jumlah (Orang)	%
1.	ASN	37	51,39
2.	Non ASN	35	48,61
Jumlah		72	100

Sumber : Bezetting Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023



Tabel diatas menggambarkan bahwa aparatur Dinas Perikanan dan Pangan terdiri dari ASN dan non ASN dengan persentase 51,39 % ASN dan 48,61% Non ASN.

Sumber Daya manusia Dinas Perikanan dan Pangan dikelompokkan dalam 4 (empat) keadaan, yaitu :

- a. Keadaan pegawai berdasarkan jenis kelamin

Keadaan Pegawai berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat seperti tabel dibawah ini:

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)	%
1.	Laki-laki	15	40,54
2.	Perempuan	22	59,46
Jumlah		37	100

Sumber : Bezetting Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023



- b. Keadaan pegawai berdasarkan golongan

Dari 37 PNS Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan di dominasi oleh pegawai golongan III yang menandakan bahwa rata-rata latar belakang pendidikan dan atau pengalaman kerja, umumnya sudah mencukupi syarat yang dibutuhkan dalam upaya optimalisasi kinerja. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.3.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah (Orang)	%
1.	IV	6	16,22
2.	III	26	70,27
3.	II	5	13,51
Jumlah		37	100,00

Sumber : Bezetting Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023



Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah Pegawai Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan di dominasi oleh pegawai golongan IV sebanyak 6 orang atau 16,22 %, golongan III sebanyak 26 orang atau 70,27 % dan golongan II sebanyak 5 atau 13,51%.

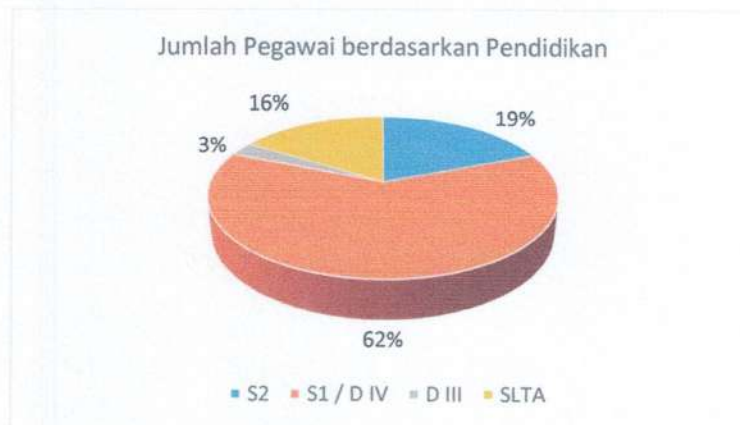
c. Keadaan pegawai berdasarkan Pendidikan

Apabila dilihat dari tingkat pendidikan pegawai Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, maka status pendidikan sarjana lebih mendominasi, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.4.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah (Orang)	%
1.	Strata 2 (S2)	7	18,92
2.	Strata 1 (S1)/DIV	23	62,16
3.	Diploma (DIII)	1	2,70
4.	SLTA	6	16,22
Jumlah		37	100,00

Sumber : Bezetting Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023



1.4 Aspek Strategis Organisasi

Laporan Kinerja Instansi Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 disusun mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya antara lain :

- 1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
- 3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporann Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5) Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

- 7) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.
- 8) Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 166 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan dan Pangan.

1.5. Permasalahan Utama (Strategic Issued)

1.5.1 Identifikasi Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

a) Bidang Perikanan

1. Pengembangan wilayah budidaya perikanan belum tertata
2. Belum optimalnya produksi hasil pembesaran budidaya tawar/laut
3. Produktivitas armada penangkapan ikan yang masih belum optimal dan struktur armada penangkapan ikan masih didominasi skala kecil dan tradisional
4. Tingginya modal perbekalan nelayan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan
5. Belum optimalnya pengolahan dan pemasaran hasil perikanan

b) Bidang Pangan

1. Ketersediaan pangan belum mampu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh
2. Pemahaman masyarakat dalam menjaga stok pangan masih tergolong rendah
3. Terbatasnya kemampuan ekonomi masyarakat dalam akses pangan
4. Tingginya angka balita stunting di Kabupaten Pesisir Selatan
5. Kurangnya kesadaran produsen PSAT terhadap keamanan dan mutu pangan
6. Belum terbentuknya Kelembagaan yang menjamin keamanan pangan

7. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pola makan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)
8. Masih rendahnya konsumsi masyarakat terhadap pangan lokal

1.5.2 Hambatan/Kendala

Terdapat beberapa masalah pokok yang dihadapi dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan saat ini, antara lain :

1. Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan tangkap.
2. Teknologi penangkapan yang dilakukan masih sederhana
3. Kurangnya permodalan nelayan untuk pengembangan penangkapan ikan.
4. Keterbatasan teknologi budidaya ikan.
5. Pola konsumsi pangan masyarakat masih belum beragam
6. Kurangnya pengetahuan masyarakat akan arti gizi dan kesehatan.

1.5.3 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan telah dijabarkan dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023. Adapun yang menjadi isu strategis Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut:

a. Bidang Perikanan

1. Kurangnya penataan tata ruang untuk pembudidayaan ikan dengan RTRW
2. Kapasitas nelayan melaut masih dibawah standar
3. Keterbatasan akses pembudidaya terhadap akses sarana dan prasarana budidaya perikanan
4. Rendahnya daya saing pengolah dan pemasar hasil perikanan.

5. Potensi SDA dan SDM di Kabupaten Pesisir Selatan cukup besar khususnya dibidang perikanan, hal ini belum dimanfaatkan secara maksimal sehingga merupakan peluang untuk dikembangkan melalui pemanfaatan teknologi yang tepat dan penggunaan input yang memadai tanpa mengenyampingkan kelestarian sumberdaya alam.
6. Wilayah laut dan darat merupakan potensi untuk pengembangan perikanan dalam rangka mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan
7. Produk-produk perikanan yang bernilai ekonomis, jika dikelola secara profesional akan mampu berperan dalam menyerap tenaga kerja yang ada serta mampu menyediakan kebutuhan produk perikanan, dan dapat meningkatkan konsumsi ikan.
8. Tersedianya lembaga perguruan tinggi dan lembaga penelitian merupakan peluang untuk mengembangkan dan memanfaatkan teknologi bagi kepentingan masyarakat perikanan.

b. Bidang Pangan

1. Masih banyaknya ditemukan pemakaian residu, zat adiktif dan zat berbahaya

Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas dan fungsi pelayanan Bidang Ketahanan Pangan dimana berperan dalam menjamin konsumsi pangan yang aman. Banyaknya ditemukan pemakaian residu, zat aditif dan zat berbahaya lainnya pada pangan segar, pangan olahan dan jajanan anak sekolah.

Komoditas pangan segar apabila dikaitkan dengan pemakain pestisida, zat adiktif dan zat berbahaya akan sangat berpengaruh karena dapat menimbulkan dampak negatif pada tubuh manusia. Hal ini dapat terjadi apabila dalam penggunaan zat adiktif dan zat berbahaya pada pangan tidak sesuai ketentuan yang ditetapkan. Makanan yang mengandung residu, zat aditif dan zat berbahaya jika

dikonsumsi dalam jumlah yang berlebih dan dalam jangka panjang dapat menimbulkan gangguan kesehatan. Untuk mengantisipasi bahaya yang ditimbulkan dalam pemakaian zat aditif dan zat berbahaya maka ditetapkan aturan dan Batas Maksimum Residu (BMR). Terkait Penggunaan residu, zat adikti dan zat berbahaya dalam pangan diatur pada Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 pasal 68 ayat 1 tentang Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya penyelenggaraan keamanan pangan disetiap rantai pangan secara terpadu

Untuk menjamin keamanan pangan segar, pangan olahan dan jajanan anak sekolah perlu dilakukan kerjasama antar sektor untuk melakukan uji terhadap pemakaian residu, zat aditif dan berbahaya lainnya. Keamanan pangan merupakan jaminan bahwa pangan tidak akan menyebabkan bahaya pada konsumen bila disiapkan atau dimakan sesuai maksud penggunaannya. Oleh karenanya keamanan pangan merupakan syarat penting yang harus melekat pada pangan yang hendak dikonsumsi oleh manusia. Pengawasan keamanan pangan segar dilakukan mulai dari on farm sampai pangan siap diedarkan. Untuk memperkuat pengawasan keamanan pangan segar, perlu koordinasi dengan instansi terkait secara terpadu, serta advokasi kepada pemangku kepentingan. Praktek penanganan pangan harus diterapkan di setiap rantai pangan. Pembinaan keamanan pangan dilaksanakan mulai dari proses budidaya dengan menerapkan praktek budidaya pertanian yang baik atau *Good Agricultural Practices (GAP)* agar menghasilkan pangan bermutu, aman dan layak dikonsumsi, cara penanganan pasca panen hasil pertanian yang baik atau *Good Holding Practice (GHP)*. Begitu juga dalam pengolahan pangan, keamanan pangan dapat dilaksanakan dengan menerapkan *Good Manufacturing Practices (GMP)*. Demikian

halnya pada rantai distribusi dan retail, keamanan pangan segar dapat dilaksanakan dengan menerapkan *Good Distribution Practices (GDP)* dan *Good Retail Practices (GRP)*.

2. Tingginya fluktuasi harga pangan yang dibutuhkan masyarakat
Fluktuasi harga bahan pokok disebabkan beberapa factor yaitu : 1) faktor iklim dan cuaca yang tidak menentu, sehingga menyebabkan Petani gagal panen, akibatnya distribusi ke masyarakat menjadi berkurang. 2) faktor infrastruktur seperti jalan yang rusak dapat menghambat jalur distribusi. 3) faktor pengaruh kondisi daerahnya. Ketiga faktor tersebut yang dapat mempengaruhi fluktuasi harga di setiap daerah.

Kenaikan harga ini akan dapat mengurangi konsumsi masyarakat, dikarenakan pendapatan masyarakat lebih kecil daripada tingkat konsumsi yang berakibat meningkatnya jumlah kemiskinan. Hal yang mempengaruhi naik turunnya harga bahan pangan pokok yaitu diakibatkan dari kelangkaan persediaan pangan pokok pada Tingkat Produsen dan Tingkat Konsumen.

Tingginya fluktuasi harga pangan yang terjadi di dalam negeri, mendorong Pemerintah untuk melaksanakan berbagai kebijakan nasional yang bertujuan untuk menstabilkan harga serta mengurangi dampak negatif yang diterima oleh produsen sekaligus konsumen. Fluktuasi harga yang ditunjukkan oleh nilai Coeffisien Variation (CV). Nilai CV harga yang tinggi menunjukkan bahwa harga jual bersifat fluktuatif dan kondisi ini akan berpengaruh terhadap inflasi.

3. Masih tingginya ketergantungan masyarakat pada pangan pokok beras.

Kesadaran tentang pentingnya upaya diversifikasi pangan telah lama diupayakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, namun hasil yang dicapai belum sesuai dengan yang diharapkan. Hal

ini merupakan implementasi Peraturan Presiden nomor 22 tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. Berbagai kegiatan berupa sosialisasi, edukasi dan promosi sudah dilaksanakan tetapi target yang dicapai dalam meningkatkan konsumsi pangan selain beras sebagai pangan pokok masih rendah.

Walaupun telah berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dan berbagai kalangan terkait, namun pada kenyataannya tingkat konsumsi masyarakat masih tertumpu pada pangan utama beras. Hal itu diindikasikan oleh skor pola pangan harapan (PPH) yang belum sesuai harapan, dan belum optimalnya pemanfaatan sumber bahan pangan lokal dalam mendukung penganekaragaman konsumsi pangan. Dikaitkan dengan potensi yang ada, Indonesia memiliki sumber daya hayati yang sangat kaya. Ironisnya, tingkat konsumsi sebagian penduduk Indonesia masih dibawah anjuran pemenuhan gizi. Oleh karena itu salah satu upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan dan gizi keluarga dapat dilakukan melalui pemanfaatan sumberdaya yang tersedia maupun yang dapat disediakan di lingkungannya. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pemanfaatan lahan pekarangan yang dikelola oleh rumah tangga.

Tingginya konsumsi beras sebagai pangan pokok dipengaruhi juga oleh tersedianya produksi beras dari petani secara terus-menerus dalam jumlah yang cukup. dan ketergantungan masyarakat terhadap pangan pokok beras karena beras sebagai pangan pokok mudah diperoleh, mudah diolah, cepat mengenyangkan, rasanya enak serta harga cukup terjangkau dan kebiasaan masyarakat yang berasumsi bahwa kalau belum makan nasi dianggap belum makan.

4. Masih banyak wilayah rawan pangan/penduduk miskin

Rawan pangan adalah kondisi ketidakmampuan suatu rumah tangga/individu untuk mengakses dan mengonsumsi pangan dalam jumlah yang cukup pada kurun waktu tertentu, baik sebagai akibat dari kegagalan produksi maupun masalah daya beli yang bila terus berlanjut berakibat pada terjadinya kelaparan, busung lapar atau gizi buruk. Secara teknis dari sisi waktu kejadiannya, kerawanan pangan dibagi menjadi 2 bagian yaitu : “Kerawanan Pangan Transien dan Kerawanan Pangan Kronis”. Kerawanan Pangan Transien adalah suatu keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara, yang disebabkan karena bencana baik yang disebabkan karena alam (misalnya gempa bumi, banjir, angin kencang, kekeringan dll) maupun yang disebabkan karena perbuatan manusia (misalnya banjir ataupun konflik sosial, dll). Kerawanan Pangan Kronis adalah : suatu kondisi ketidak mampuan rumah tangga untuk memenuhi standar minimum kebutuhan pangan anggotanya pada periode yang lama karena adanya keterbatasan kepemilikan lahan, asset produksi dan kekurangan pendapatan.

Salah satu penyebab utama kerawanan pangan adalah kemiskinan yang berkepanjangan. Pendekatan yang dilakukan dalam percepatan penanggulangan kemiskinan / rawan pangan adalah pemberdayaan masyarakat melalui : (1) pelatihan; (2) demplot; (3) pendampingan; (4) peningkatan akses untuk pengembangan kerjasama partisipasi inklusif; (5) peningkatan kapasitas individu dan kelembagaan masyarakat, perubahan sosial dan ekonomi yang lebih baik; serta (6) peningkatan ketahanan pangan.

5. Belum optimalnya diversifikasi produk pangan lokal dan pentingnya mengonsumsi menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA). Dengan berpedoman kepada Peraturan daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025, maka periode RPJMD tersebut merupakan tahap ketiga dari pelaksanaan RPJPD yang diarahkan kepada “mengembangkan sektor industri dan jasa (agroindustri dan pariwisata)” sebagai kelanjutan dari pencapaian pembangunan periode sebelumnya.

Agrobisnis memiliki peranan strategis dalam upaya pemenuhan bahan kebutuhan pokok, perluasan, pemberdayaan produksi dalam negeri, perolehan devisa, pengembangan sektor ekonomi, dan perbaikan perekonomian masyarakat pedesaan. Pengembangan Agrobisnis berbasis pangan lokal berbagai aspek perlu diperhatikan dalam upaya mengembangkan agroindustri berbasis pangan lokal. Ketersediaan bahan baku yang merupakan faktor utama. Faktor lain yang perlu dipertimbangkan adalah teknologi pengolahan, sumberdaya manusia dan pasar.

Disamping itu masih rendahnya diversifikasi produk pangan lokal disebabkan keterbatasan potensi sumber pangan lokal pengganti dan kurangnya keterampilan dan teknologi tepat guna dalam pengolahan pangan lokal oleh masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, penganekaragaman konsumsi pangan sebagai dasar pemantapan ketahanan pangan untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) perlu dikembangkan dan ditingkatkan.

Dari sisi kebijakan pemerintah dapat dilakukan dalam kegiatan resmi di daerah selalu disajikan makanan lokal, ini merupakan salah satu cara promosi yang bermanfaat bagi produsen. Makanan tradisional perlu terus dipromosikan di hotel, restoran, pesta pernikahan dan pada rapat-rapat kantor. Festival masakan tradisional berbahan baku lokal perlu diadakan secara rutin di tiap daerah maupun tingkat nasional sebagai upaya promosi pangan lokal. Dan pada tahun 2023 Dinas Perikanan dan Pangan telah mengikuti event pengolahan

pangan lokal Tingkat Propinsi dan mendapat peringkat harapan III, hal ini merupakan salah satu usaha dari Dinas Perikanan dan Pangan dalam mempromosikan pangan lokal yang ada di daerah Pesisir Selatan.

Dalam rangka pengembangan pola konsumsi Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya konsumsi pangan beragam bergizi seimbang dan Aman (B2SA) yang bersumber dari pangan lokal.
- b) Melaksanakan pembinaan dan meningkatkan motivasi kepada masyarakat tentang pentingnya konsumsi pangan beragam bergizi seimbang dan Aman (B2SA) yang bersumber dari pangan lokal.
- c) Meningkatkan keterampilan dalam pengembangan olahan pangan lokal yang beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA).
- d) Mengembangkan dan mendiseminasikan teknologi tepat guna untuk pengolahan pangan lokal yang beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA)
- e) Promosi penganeekaragaman pangan untuk meningkatkan pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) melalui media cetak, media elektronik, media sosial, gerakan kampanye, pameran, media luar ruang, pilot project serta sarana percontohan.
- f) Menjalin kerjasama dengan OPD terkait dan lintas sektor dan lembaga masyarakat untuk membantu upaya peningkatan konsumsi pangan beragam bergizi seimbang dan Aman (B2SA) yang bersumber dari pangan lokal.
- g) Meningkatkan koordinasi dengan Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat dan Badan Pangan Nasional untuk memfasilitasi

masyarakat dalam upaya pentingnya konsumsi pangan beragam berizi seimbang dan Aman (B2SA) yang bersumber dari pangan lokal.

6. Belum optimalnya pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten, pemerintah nagari dan kelembagaan cadangan pangan Masyarakat.

Cadangan Pangan Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan terdiri dari : (1) cadangan pangan pemerintah; (2) cadangan pangan pemerintah daerah; dan (3) cadangan pangan masyarakat. sedangkan cadangan pangan pemerintah daerah terdiri dari cadangan pangan pemerintah provinsi, cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota dan cadangan pangan pemerintah desa.

Cadangan pangan adalah persediaan bahan pangan pokok yang disimpan oleh pemerintah dan masyarakat yang dapat dimobilisasi secara cepat untuk keperluan konsumsi maupun menghadapi keadaan darurat dan antisipasi terjadinya gejolak harga.

Penyelenggaraan cadangan pangan meliputi kegiatan pengadaan, pengelolaan, penyaluran, dan pelepasan memerlukan penanganan yang serius. Pendekatan sistem pangan melalui penyelenggaraan cadangan pangan yang mampu mendukung kebutuhan pangan saat situasi krisis pangan sebagai dampak dari bencana alam dan bencana sosial. Mengingat bahwa cadangan pangan daerah merupakan asset yang dimiliki oleh pemerintah daerah, maka penyelenggarannya perlu diselaraskan dengan aturan yang telah ada melalui pembuatan mekanisme, tata cara penyelenggaraan yang benar, sesuai dengan sistem tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan benar. Prinsip akuntabel, dan bertanggungjawab dari penyelenggaraan cadangan pangan menjadi dasar bagi penyelenggaraan cadangan

pangan milik pemerintah daerah. Oleh karena tatacara penyelenggaraan cadangan pangan perlu diatur dalam sebuah peraturan, yang akan mengikat pada siapapun dan organisasi pemerintah daerah yang ditugasi menyelenggarakan cadangan pangan. Pembuatan aturan penyelenggaraan cadangan pangan diharapkan mampu menghilangkan kekeliruan dalam cara pengadaan, pengelolaan, penyaluran bantuan dan pelepasan cadangan pangan. Dimana sasaran penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah adalah Masyarakat yang sangat memerlukan bantuan pangan yang karena kondisi dan situasinya, sulit untuk mendapatkan pangan, sertaantisipasi keadaan darurat, bencana alam dan bencana sosial. Sistem penyelenggaraan cadangan pangan melibatkan stakeholder dalam pelaksanaan kegiatan cadangan pangan, selain pembenahan meliputi cara pengadaan, cara pengelolaan, dan cara penyaluran.

Pengelolaan cadangan pangan yang baik menjadi sangat penting dalam upaya mewujudkan ketersediaan pangan yang cukup bagi seluruh penduduk dan mengupayakan agar setiap rumah tangga mampu mengakses pangan sesuai kebutuhannya.

Penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten/ Pemerintahan Nagari dilakukan melalui :

- a. Pengadaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten / Pemerintah Nagari;
- b. Pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten / Pemerintah Nagari;
- c. Penyaluran cadangan pangan Pemerintah Kabupaten / Pemerintah Nagari.

Pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Nagari dan cadangan pangan masyarakat diarahkan pada :

- a. Cadangan pangan untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar daerah (*Buffer Stock*);
 - b. Cadangan pangan untuk menjaga stabilitas harga pangan (*Buffer Stock*);
 - c. Cadangan pangan untuk mengatasi goncangan harga eksternal, mengantisipasi dan mengatasi defisit pangan tidak terduga (*Emergency Reserve*);
7. Belum optimalnya kerjasama sinergis diantara OPD terkait dalam mendukung Ketahanan Pangan di Kabupaten Pesisir Selatan

Dalam membangun ketahanan pangan dan gizi sangat kompleks, memerlukan peran aktif seluruh elemen masyarakat untuk menumbuhkembangkan kesadaran dalam mewujudkan kemandirian pangan guna ketersediaan pangan di tingkat nasional, daerah hingga sampai perorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk hidup sehat, aktif dan produktif.

1.5.4 Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perikanan dan Pangan ini menjelaskan tentang capaian kinerja tahun 2023 dan dipersandingkan dengan Perjanjian Kiknerja tahun 2023 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja dimasa mendatang.

tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).
8. Realisasi Anggaran, menjelaskan anggaran dan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup : menjelaskan simpulan umum dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2023 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja yang akan dicapai Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2023 terbagi atas Rencana Kinerja Sasaran dan Rencana Kinerja Kegiatan. Rencana Kinerja sasaran Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan merupakan Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan antara Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan dengan Bupati Pesisir Selatan yang harus dipenuhi sepanjang tahun 2023. Perjanjian Kinerja disesuaikan dengan susunan agenda, prioritas, sasaran pembangunan pada RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026.

2.1 RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan dan memperhatikan prioritas nasional, serta mengakomodir visi, misi, program kepala daerah terpilih, maka visi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 adalah :

VISI

“Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju, dan Bermartabat didukung Pemerintahan yang akuntabel dan Profesional”

Sejahtera mengandung makna dalam lima tahun kedepan akan semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat, yang diindikasikan dengan meningkatnya pendapatan perkapita penduduk yang berdampak pada menurunnya angka kemiskinan, serta peningkatan akses pelayanan kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar;

Maju mengandung makna membangun daerah yang dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, dukung sumberdaya manusia yang unggul, professional, berperadaban tinggi, berdaya saing, berakhlak mulia serta berwawasan ke depan;

Bermartabat mengandung makna kondisi kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara yang bertumpu pada nilai-nilai budi pekerti dan budaya yang luhur, mengedepankan ASB-SBK (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah);

Akuntabel mengandung makna tanggung jawab yang bersifat objektif dan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjelaskan kinerja atas tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban;

Profesional mengandung makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang ditandai dengan meningkatnya partisipasi publik, semakin transparan dan efektifnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme).

Untuk mewujudkan Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tersebut, ditetapkan lima Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan;
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat;
3. Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah;
4. Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan;
5. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing;
6. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tenteram dan dinamis.

Dalam mencapai Visi Misi Kepala Daerah yang terpilih Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan mengacu kepada Misi kedua dan ketiga yaitu Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat dan Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan Mendorong Sektor Potensi dan Unggulan Daerah;

2.2 Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026

Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Perikanan merupakan dokumen yang menjelaskan secara garis besar memuat visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten

Pesisir Selatan Tahun 2021-2026. Visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator
Dinas Perikanan dan Pangan Tahun 2023

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator
1. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi	1. Terwujudnya yang Pemerintahan Akuntabel dan Berkinerja 2. Meningkatkan Kualitas Inovasi Daerah	1. Nilai AKIP Perangkat Daerah 2. Nilai Kematangan Inovasi PD
2. Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat	Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin	Pencapaian Skor (PPH) Pola Pangan Harapan
3. Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah	Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Secara Berkelanjutan	Meningkatnya Daya Saing Sektor Unggulan	Nilai Tambah Produksi Hasil Perikanan

2.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berdasarkan tujuan tersebut, Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan sesuai periode Renstra. Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2021-2026

IKU sebelum rasionalisasi Renstra tahun 2021-2026

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	TAHUN					SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	
			2021	2022	2023	2024	2025			2026
Meningkatkan Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan (Ton)	$\frac{\text{Jumlah Produksi Ikan (Ton)}}{\text{Target Daerah (Ton)}} \times 100\%$	46.168	48.977	49.818	50.693	51.604	52.553	RPJMD	Urusan Perikanan
Meningkatnya Ketersediaan Pangan	Persentasi Ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras / jagung sesuai kebutuhan)	$\frac{\text{Rata Jumlah Ketersediaan pangan utama per tahun (kg)}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$	95	100	100	100	100	100	RPJMD	Urusan Pangan
Meningkatnya Pengankaragaman Konsumsi Pangan	Tingkat Konsumsi Energi Pangan (Kkal/kapita/hari)	$\frac{\text{Jumlah energi rumah tangga per hari}}{\text{Jumlah Angka Rumah Tangga (ART)}}$	2.250	2.225	2.200	2.175	2.150	2.150	RPJMD	Urusan Pangan
	Tingkat Konsumsi Protein (gram/kapita/hari)	$\frac{\text{Jumlah protein rumah tangga per hari}}{\text{Jumlah Angka Rumah Tangga (ART)}}$	61,45	60,34	59,28	58,11	57,00	57,00	RPJMD	Urusan Pangan

IKU setelah rasionalisasi Renstra tahun 2021-2026

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Hasil penilaian Inspektorat Daerah			A	A	A	A
Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi PD	Hasil penilaian saat pengentrian kriteria inovasi pada aplikasi IGA			100	100	100	100
Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan	$\frac{\text{Jumlah skor pph}}{\text{Jumlah skor maksimum}} \times 100\%$			82	84	85	87
Meningkatkan Daya Saing Sektor Unggulan	Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan	(Produksi x Harga Olahan) - (Produksi x harga bahan baku)			85.885.000.000	86.035.000.000	86.235.000.000	86.485.000.000

2.2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Berdasarkan tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan pada Rencana Strategis 2021-2026. Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan telah Menyusun Rencana Kinerja Tahun 2023 dengan indicator sebagai berikut:

Tabel 2.3
Rencana Kinerja Tahunan 2023
Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perikanan dan Pangan	Nilai RB Perangkat Daerah Nilai AKIP Perangkat Daerah	B(65) A
2	Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan	82
3	Meningkatkan Daya Saing Sektor Unggulan	Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan	Rp. 85.885.000.000

2.3 Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023

Penetapan Perjanjian kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggungjawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan sumberdaya yang tersedia. Penetapan kinerja ini menjabarkan target kinerja berupa nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah yang telah ditetapkan berpedoman pada Rencana Strategis Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, dan Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023.

Adanya rasionalisasi Target Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 telah dilakukan rasionalisasi target

Capaian Kinerja Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 pada Bab IV tentang target kinerja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan dalam bentuk Berita Acara Rasionalisasi Rencanan Strategis (Renstra).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 739 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi diantaranya Evaluasi Reformasi Birokrasi tidak dilakukan kepada seluruh Perangkat Daerah. Sehubungan peraturan tersebut, maka dilakukan Revisi Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan sesuai Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 050/1132.1/Bapedalitbang/2023 tanggal 25 Oktober 2023 perihal Revisi Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah.

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Dinas Perikanan dan Pangan
Kabupaten Pesisir Selatan

Perjanjian Kinerja sebelum Revisi

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET 2023
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah Nilai RB Perangkat Daerah	A B (65)
2	Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan	82
3	Meningkatnya Daya Saing Sektor Unggulan	Nilai Tambah Produksi Hasil Perikanan	Rp. 85.885.000,000,-
4	Meningkatkan Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi PD	100

Perjanjian Kinerja setelah revisi

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET 2023
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A
2	Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan	82
3	Meningkatnya Daya Saing Sektor Unggulan	Nilai Tambah Produksi Hasil Perikanan	Rp. 85.885.000,000,-
4	Mengkatkan Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi PD	100

Untuk mewujudkan perjanjian kinerja tersebut, DLinas Perikanan dan Pangan melaksanakan 7 program dengan 19 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 14.977.977.559,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.5
Program dan Anggaran Tahun 2023
Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	4.888.537.459
2	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	170.000.019
3	Program Penanganan Kerawanan Pangan	294.999.576
4	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	5.731.273.922
5	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.728.272.760
6	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	2.164.893.823
	Jumlah	14.977.977.559

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



kuntabilitas kinerja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 adalah perwujudan kewajiban Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumber dana lainnya, dalam rangka mencapai misi pemerintah daerah secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023. Akuntabilitas kinerja ini mencakup 4 (empat) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja.

3.1 Metode Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran Kinerja yang dilakukan adalah pengukuran capaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan serta analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis diukur dengan capaian kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang berkenaan. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan sebagaimana tercantum pada tabel 3.1.

Tabel 3.1
Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	85% - 100%	Sangat Baik
2	69% - 84%	Baik
3	53% - 68%	Cukup
4	< 53%	Kurang Baik

3.2. Hasil Pengukuran Kinerja

Hasil pengukuran capaian target indikator kinerja utama 2 (dua) sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2.
Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023

No	Misi/Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
Misi 1: Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan					
Tujuan 1 : Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi					
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A	A (80,97)	100
2	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi PD	100	63	63
Misi 2: Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat					
Tujuan 1 : Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat					
1.	Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin	Pencapaian Skor (PPH) Pola Pangan Harapan	82	88,9	108,41
Misi 3: Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah					
Tujuan 1 : Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Secara Berkelanjutan					
1.	Meningkatnya Daya Saing Sektor Unggulan	Nilai tambah produk hasil perikanan (Rupiah)	Rp. 85.885.000.000	Rp. 86.735.261.500	100,99
Rata-rata capaian					93,10

Dari tabel 3.2. dapat dilihat bahwa 3 (tiga) dari 4 (empat) indikator yang ditetapkan tahun 2023 terlihat rata-rata capaian indikator kinerja sudah mencapai target bahkan melebihi dari target yang ditetapkan yaitu nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Perikanan dan Pangan dengan nilai 80,97 (A) dari target 100 (A), hasil pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dengan realisasi 88,9 dari target yang ditetapkan 82 atau dengan capaian 108,41 %, hal ini menunjukkan

bahwa semakin beragamnya pangan yang dikonsumsi Masyarakat, dan pada indikator Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan dengan realisasi Rp. 86.735.261.500,- dari target Rp. 85.885.000.000,- dengan capaian 100,99 %, dan ada 1 (satu) indikator yang belum mencapai target yaitu Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah 63 dari target nilai 100, hal ini perlunya keseriusan Dinas Perikanan dan Pangan dalam mendorong inovasi, karena penyelenggaraan Inovasi Daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik; pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan peningkatan daya saing daerah.

3.3. Analisa dan Evaluasi Capaian Kinerja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan

Berdasarkan Rencana Strategis tahun 2021-2026 dan Dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2023 yang telah ditetapkan, dilakukan pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja per sasaran. Berikut disajikan hasil pengukuran kinerja per sasaran.

3.3.1 Hasil Pengukuran Sasaran Strategis pada Target RPJMD tahun 2021-2026

Dalam mewujudkan misi 1, telah ditetapkan 2 (dua) sasaran. Selanjutnya uraian pencapaian tujuan dan evaluasi serta analisis pencapaian sasaran strategis secara sistematis disajikan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1
Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel dan Berkinerja

Indikator yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini terdiri dari 2 (dua) Indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 3.3 dibawah ini :

Tabel 3.3
Nilai AKIP Dinas Perikanan dan Pangan Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A	A	100
	Jumlah			100

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Perikanan dan Pangan dengan nilai A atau 80,9 dari

Laporan Hasil Evaluasi (LHE) yang dinilai oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Capaian sasaran strategis 1 didukung oleh beberapa Program yaitu :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di dukung 5 kegiatan dan 19 sub kegiatan. Program ini mendukung kinerja pemerintah. Rp. 4.888.537.459,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.683.272.630,- atau 95,80 %.

Sasaran 2
Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah

Indikator yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini terdiri dari 1 (satu) Indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 3.4 dibawah ini :

Tabel 3.4
Nilai Kematangan Inovasi
Dinas Perikanan dan Pangan Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Nilai Kematangan Inovasi PD	100	63	63
	Jumlah			63

Dari tabel diatas terlihat bahwa inovasi yang dilakukan oleh bidang Budidaya tentang Forum UPR (unit Pembenihan Rakyat) masih rendah, perlunya keseriusan Dinas Perikanan dan Pangan dalam mendorong inovasi, karena penyelenggaraan Inovasi Daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan Masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik; pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah.

Untuk mewujudkan misi 2, telah ditetapkan 1 (satu) sasaran. Selanjutnya uraian pencapaian tujuan dan evaluasi serta analisis pencapaian sasaran strategis secara sistematis disajikan sebagai berikut:

Sasaran 3
Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 3 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu pencapaian Skor Pola Pangan harapan (PPH).

Dalam penentuan skor PPH ada indikator yang saling berkaitan atau mempengaruhi yaitu tingkat konsumsi pangan masyarakat.

Tingkat Konsumsi pangan

a. Konsumsi energi

Formulasi :

Tingkat konsumsi Energi : $\frac{\text{Jumlah energi rumah tangga per hari}}{\text{Jumlah Angka Rumah Tangga (ART)}}$

b. Konsumsi protein

Formulasi :

Tingkat konsumsi protein : $\frac{\text{Jumlah protein rumah tangga per hari}}{\text{Jumlah Angka Rumah Tangga (ART)}}$

Pencapaian target kinerja dan realisasi kinerja tingkat konsumsi tahun 2023, sebagai berikut :

Tabel 3.5
Capaian Tingkat Konsumsi Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Tingkat Konsumsi Pangan : Konsumsi Energi	Kkal/kapita/hari	2.247	2.115	94,13
	Konsumsi Protein	Gram/kapita/hari	60	57,50	95,83
Rata-rata Capaian					94,98

Pada tabel dapat dilihat bahwa realisasi Tingkat konsumsi energi 2.115 Kkal/kapita/hari lebih rendah dari target 2.247 Kkal/kapita/hari dengan capaian 94,13%. Sedangkan realiasi konsumsi protein 57,50 Gram/kapita/hari lebih rendah dari target 60 Gram/kapita/hari dengan capaian 95,83%. Namun demikian masih melebihi Angka Kecukupan Energi (AKE) Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi Tahun 2018 yaitu 2.100 kkal/kapita/hari dan Angka Kecukupan Protein (AKP) Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi Tahun 2018

yaitu 57 gram/kapita/hari. Artinya konsumsi pangan Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan baik Konsumsi Energi maupun Konsumsi Protein masih batas tetap diatas anjuran. Tercukupinya energi karena ketersediaan yang mencukupi.

Tabel 3.6
Perbandingan Capaian Tingkat Konsumsi Pangan
Tahun 2022 dan 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Tingkat Konsumsi Pangan : Konsumsi Energi	Kkal/kapita/hari	2.225	2.071	93,08	2.247	2.115	94,13
	Konsumsi Protein	Gram/kapita/hari	60.34	54,4	90,15	60	57,50	95,83
Rata-rata Capaian					91,61			94,98

Dari rata-rata capaian Tingkat konsumsi 2 (dua) tahun terakhir terjadi peningkatan baik pada konsumsi energi sebesar 1,05 % maupun konsumsi protein yaitu sebesar 5,68 % artinya pencapaian sasaran strategis 3 termasuk sangat baik dengan kategori sangat berhasil.

Untuk melihat perkembangan tingkat konsumsi pangan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2023 dapat dilihat seperti tabel dibawah ini:

Tabel 3.7
Perkembangan Tingkat Konsumsi Pangan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2023

No	Uraian	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
1.	Tingkat konsumsi pangan				
	a. Konsumsi energi (kkal/kapita /hari)	2.249,66	2.420	2.071	2.115
	b. Konsumsi protein (gram/kapita/hari)	60,29	65	54,4	57,5

Dari tabel dapat dijelaskan bahwa perkembangan capaian konsumsi energi dan protein dari 9 kelompok pangan terjadi peningkatan selama kurun waktu tahun (2020-2023) dapat dilihat hasil sebagai berikut :

1. Konsumsi energi

Berpedoman pada Angka Kecukupan Energi (AKE) Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi XI Tahun 2018 yaitu 2.100 kkal/ kapita/hari, secara

keseluruhan dari ke 9 kelompok pangan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir dapat disimpulkan telah normal, seperti dilihat dari perkembangan Tingkat konsumsi pangan di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020 konsumsi energi sebesar 2.249,66 kkal/kapita/hari, pada tahun 2021 tingkat konsumsi energi sebesar 2.420 kkal/kapita/hari melebihi AKE yaitu sebesar 2.100 kkal/kapita/hari artinya rata-rata konsumsi energi dan protein pada rumah tangga di Kabupaten Pesisir Selatan berada pada kategori normal yaitu 107,14 % AKE tahun 2020 dan 115,24 % AKE pada tahun 2021, namun pada tahun 2022 terjadi penurunan tingkat konsumsi energi yaitu menjadi 2.071 kkal/kapita/hari dan tahun 2023 sebesar 2.115 kkal/kapita/hari artinya pada terjadi penurunan AKE yaitu 98,62 % AKE tahun 2022 dan Kembali normal 100,71 % AKE tahun 2023, namun hal itu tidak mempengaruhi terhadap konsumsi pangan Masyarakat.

2. Konsumsi protein

Angka Kecukupan Protein (AKP) Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi Tahun 2018 yaitu 57 gram/kapita/hari secara keseluruhan dari ke 9 kelompok pangan dalam kurun waktu Tahun 2020 sebesar 60,29 gram/kapita/hari. Tahun 2021 konsumsi protein sebesar 65 gram/kapita/hari. Dan pada tahun 2022 konsumsi protein sebesar 54,4 gram/kapita/hari Konsumsi energi ini lebih rendah dari AKP tapi masih dalam mendekati normal, dan tahun 2023 menjadi 57,5 gram/kapita/hari, artinya pemenuhan protein pada pangan Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan telah ideal dan beragam bergizi dan seimbang. Ketahanan pangan didefinisikan sebagai terpenuhinya kebutuhan pangan bagi setiap individu sepanjang waktu untuk dapat hidup sehat dan aktif beraktifitas, mencakup aspek ketersediaan, distribusi, keterjangkauan (fisik dan ekonomi) dan dimensi waktu.

Pada tataran rumah tangga, ketahanan pangan dipengaruhi oleh ketersediaan pangan baik di Tingkat rumah tangga maupun wilayah dan

daya beli. Daya beli rumah tangga terhadap pangan yang dibutuhkan tergantung dari Tingkat pendapatan dan harga pangan.

Tingkat pendapatan rumah tangga tergantung dari jumlah dan produktivitas tenaga kerja, jenis pekerjaan dan Tingkat upah.

Sementara ketersediaan pangan ditingkat rumah tangga dipengaruhi oleh kemampuan rumah tangga untuk menghasilkan dan membeli pangan yang dibutuhkan. Selain itu karena pengertian ketahanan pangan mencakup terpenuhinya kebutuhan pangan, maka pola atau Tingkat konsumsi penduduk merupakan faktor penentu tingkat ketahanan pangan rumah tangga.

1. Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2023

Pencapaian tingkat konsumsi baik energi maupun protein dalam 4 tahun terakhir dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 3.8
Perbandingan Skor PPH Kabupaten Pesisir Selatan dengan Skor Maksimal PPH (tahun 2020,2021,2022, 2023)

No	Kelompok pangan	Skor Maks PPH	Skor PPH 2020	Skor PPH 2021	Skor PPH 2022	Skor PPH 2023
1	Padi-padian	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
2	Umbi-umbian	2,5	0,6	0,7	0,6	0,8
3	Pangan Hewani	24,0	20,2	18,9	19,5	20,9
4	Minyak dan Lemak	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
5	Buah/Biji Berminyak	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
6	Kacang-kacangan	10,0	2,6	2,5	4,4	4,9
7	Gula	2,5	1,9	1,8	1,8	1,6
8	Sayur dan Buah	30,0	25,4	25,6	29,6	29,7
9	Lain-lain	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Jumlah	100,0	81,7	80,4	86,9	88,9

Keterangan: 1) AKE di tingkat konsumsi adalah 2.000 kkal/kap/hari (berdasarkan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VIII, 2004);
2) AKE di tingkat konsumsi adalah 2.100 kkal/kap/hari (berdasarkan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi XI, 2018);
3) Bobot kelompok pangan digunakan untuk penghitungan skor PPH nasional dan regional.
4) Data diolah oleh GMSK-IPB dan Pusat Konsumsi dan Keamanan Pangan, 2004.
5) Skor PPH Regional digunakan sebagai standar/acuan komposisi pangan ideal Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat
6) Kisaran persentase energi terhadap AKG (FAO-RAPA, 1989) sebagai acuan menuju komposisi pangan ideal.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa ada beberapa kelompok pangan masih dibawah skor maksimum PPH, tetapi meningkat dibandingkan 3 tahun terakhir. Untuk kelompok padi-padian cenderung stabil, tingginya

konsumsi kelompok padi-padian khusus beras, kemungkinan disebabkan oleh pola makan masyarakat yang masih tergantung pada beras sebagai sumber energi dan didukung oleh produksi dan ketersediaan beras yang cukup tinggi. Konsumsi pada 4 (empat) kelompok pangan masih rendah, hal ini kemungkinan disebabkan kebiasaan Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan dalam mengkonsumsi, seperti umbi-umbian, karena bukan makanan pokok, kemudian masih rendahnya daya beli masyarakat terhadap beberapa bahan pangan seperti, pangan hewani dan kacang-kacangan.

Pentingnya keberagaman konsumsi karena konsumsi pangan yang beragam erat kaitannya dengan konsumsi pangan yang berkualitas, sehingga memenuhi angka kecukupan gizi dan energi. Selain itu, keberagaman konsumsi dapat menekan ketergantungan terhadap komoditas pangan tertentu, khususnya komoditas pangan yang masih mengandalkan impor,

Kesembilan kelompok pangan tersebut merepresentasikan 3 kelompok fungsi pangan bagi tubuh, yaitu sebagai sumber karbohidrat atau tenaga (padi-padian, umbi-umbian, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, dan gula), sumber protein atau zat pembangun (pangan hewani dan kacang-kacangan), serta sumber vitamin dan mineral atau zat pengatur (sayuran dan buah).

Untuk target skor PPH Nasional mengacu pada RPJMN dan usulan dari Badan Pangan Nasional. Sedangkan untuk skor PPH Daerah mengacu pada RPJMD, target nasional, dan usulan Badan Pangan Nasional. Sementara itu, target skor PPH nasional pada tahun 2023 adalah 94,0 dan target 2024 adalah 95,2 dari skor PPH ideal 100. "Diharapkan dengan Perbadan tentang PPH ini dapat dilakukan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat termasuk juga pengentasan daerah rentan rawan pangan dan gizi serta pengurangan *stunting*. Saat ini yang pasti Pemerintah semakin serius terhadap gerakan penganekaragaman konsumsi pangan untuk pemenuhan gizi masyarakat,"

Tabel 3.9
Hasil Pengukuran antara Realisasi, Target Kinerja dan
Indikator Kinerja Sasaran 3

No	Sasaran	Indikator	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian 2023
1.	Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin	Pencapaian Skor (PPH) Pola Pangan Harapan	82	88,9	108,41

Dasar Perhitungan :

$$\begin{aligned}
 \% \text{ Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\
 &= \frac{88,9}{82} \times 100\% \\
 &= 108,41 \%
 \end{aligned}$$

2. Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya

Pencapaian target kinerja sasaran Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin dengan indicator pencapaian skor PPH selama 4mpat tahun terakhir dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 3.10
Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja
tahun sebelumnya Tahun 2020 s/d 2023

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Capaian (%)			
	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Pencapaian Skor (PPH) Pola Pangan Harapan	86,6	87	82	82	81,7	80,4	86,9	88,9	94,34	92,41	105,97	108,41

3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Faktor keberhasilan pencapaian sasaran strategis 3 :

- a) Produksi pangan yang tersedia dalam jumlah yang cukup untuk dikonsumsi masyarakat
- b) Penganekaragaman pangan (diversifikasi pangan) melalui sosialisasi maupun penyuluhan bagi masyarakat untuk tidak bergantung pada

satu sumber pangan memungkinkan masyarakat dapat menetapkan pangan pilihan sendiri.

- c) Pemberdayaan kaum perempuan melalui peningkatan pendidikan dan keterampilannya dalam pemanfaatan lahan pekarangan melalui kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari yang memungkinkan masyarakat memenuhi kebutuhan pangannya sendiri.
- d) Gerakan konsumsi beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) yang mengajak masyarakat untuk mengkonsumsi pangan secara beragam, bergizi, seimbang dan aman untuk dikonsumsi.

Hambatan yang dihadapi :

- a) Jumlah penduduk yang cukup besar menyebabkan permintaan pangan lebih tinggi dari pada ketersediaan.
- b) Pola konsumsi pangan masyarakat masih belum beragam.
- c) Kurangnya pengetahuan masyarakat akan arti gizi dan kesehatan.
- d) Promosi dan penyebaran informasi masih terbatas.

Strategi/Upaya yang dilakukan dalam menghadapi hambatan :

- a) Meningkatkan produksi pangan dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada guna memenuhi kebutuhan dan permintaan pasar yang semakin meningkat.
- b) Penyediaan suplai pangan dengan mengembangkan sumberdaya lokal yang dilakukan melalui pengembangan pemanfaatan pekarangan, pengembangan pangan lokal dan pengembangan makanan tradisional.
- c) Meningkatkan promosi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman.
- d) Pembinaan kepada pedagang kecil guna meningkatkan kesadaran untuk memproduksi, menyediakan dan memperdagangkan aneka ragam pangan yang aman.
- e) Pelaksanaan kegiatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dengan pemanfaatan pekarangan pangan lestari guna membantu pemenuhan gizi keluarga.

4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan /kegagalan Berdasarkan analisis terdapat keselarasan dalam pencapaian target pernyataan kinerja untuk program/kegiatan yang mendukung pada sasaran 3. Dinas Perikanan dan Pangan pada tahun 2023 melaksanakan 2 program sebagai berikut :

Tabel 3.11
Program Kegiatan yang Mendukung Sasaran Strategis 3

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	. 170.000.019	159.495.512	93,82
2.	Penanganan Kerawanan Pangan	294.999.576	240.448.355	81,51
	Jumlah	464.999.595	399.946.867	86,01

Capaian sasaran strategis 3 juga didukung oleh Program yaitu :

- a. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Program ini bertujuan untuk meningkatkan Ketersediaan Pangan, sehingga cukup memenuhi kebutuhan pangan. Pagu Anggaran program ini sebesar Rp. 170.000.019,- dengan realisasi sebesar Rp. 159.495.512,- Program ini terdiri dari 2 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan.

- I. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Kabupaten Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Kegiatan ini terdiri dari 3 Sub Kegiatan,

- a) Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan

Pagu Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 24.999.970,- dengan realisasi sebesar Rp. 22.368.170,- atau 89.47 %,

Kegiatan yang dilaksanakan pada sub kegiatan ini pencatatan harga pasar untuk menyusun Neraca Bahan Makanan (NBM), Hambatan dan Kendala tidak ada.

b) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya

Pagu Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 55.000.176,- dengan realisasi sebesar Rp. 50.605.392,- atau 92,01 %, Hambatan dan Kendala tidak ada.

Melakukan Gerakan Pangan Murah (GPM) di 4 (empat) titik lokasi yaitu di Kecamatan Koto XI Tarusan, Kecamatan Bayang, Kecamatan IV Jurai dan Kecamatan Batang Kapas. Kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) di fasilitasi oleh Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat melalui Toko Tani Indonesia Center (TTIC). Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka stabilisasi harga dan pasokan bahan pangan pokok dalam menghadapi Bulan Suci Ramadhan Tahun 1444 H.

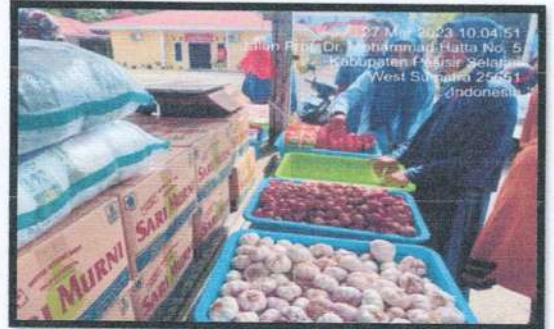
Kecamatan Bayang



Kecamatan Koto XI Tarusan



Kecamatan IV Jurai



Kecamatan Batang Kapas





- Melakukan pemantauan harga bahan pangan pokok di tingkat produsen maupun konsumen

Pemantauan Harga Bahan Pokok Tingkat Konsumen



Pemantauan Harga Bahan Pangan Pokok dan Stok Pangan Tk. Produsen



- II. Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi, kegiatan ini terdiri dari 1 Sub Kegiatan
 - a) Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
Sub kegiatan ini bertujuan untuk memanfaatkan pekarangan sehingga menghasilkan keanekaragaman Pangan sehingga dapat menambah pendapatan keluarga. Pagu Anggaran pada

sub kegiatan ini sebesar Rp. 89.999.873,- dengan realisasi sebesar Rp. 86.524.950,- atau 96,14 %, Pelaksanaan pada Sub kegiatan ini berupa :

1. Memfasilitasi bantuan hibah kegiatan Pengembangan KRPL untuk kelompok Wanita Tani (KWT) pada 6 Kecamatan yang berasal dari dana APBD Propinsi.
2. Melaksanakan Sosialisasi Kosumsi Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman untuk pencegahan dan penurunan stunting
3. Sosialisasi Gerakan Sadar Pangan B2SA.
4. Pembinaan Kelembagaan Masyarakat yaitu Kelompok Tani dan Kelompok Wanita Tani serta Kelembagaan TP PKK dalam meningkatkan penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal.
5. Menumbuhkan motivasi dengan memberikan sosialisasi dan edukasi sumber daya manusia (SDM) masyarakat untuk meningkatkan wawasan tentang tentang penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal dan Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA).
6. Melakukan promosi tentang pengolahan pangan lokal dan pola konsumsi pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) kepada masyarakat.
7. Meningkatkan ketersediaan Penganekaragaman Pangan lokal melalui fasilitasi bantuan Pengembangan KRPL dana Hibah Dinas Pangan Propinsi Sumatera Barat.

Upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi masalah diatas adalah :

1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat berupa sosialisasi dan edukasi pentingnya konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang

dan aman kepada masyarakat, TP PKK, kader, penyuluh dan untuk keluarga yang memiliki ibu hamil dan anak dengan kasus stunting.

2. Meningkatkan kegiatan aksi berupa promosi dan anggaran bantuan kepada kelompok berupa anggaran dan teknis dalam membantu masyarakat untuk mampu memanfaatkan pekarangan rumah sebagai ketahanan pangan keluarga.

Pelaksanaan sosialisasi konsumsi menu beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) dalam rangka pencegahan dan pemurunan stunting di Kecamatan Koto XI Tarusan dan Kecamatan Sutera bulan Maret dan Juni 2023.



Kabupaten Pesisir Selatan mengikuti lomba Pengolahan Pangan Sehat Anak Tingkat Sekolah Dasar lomba Pangan Got Talent tingkat anak Sekolah Dasar Tingkat Propinsi Sumatera Barat di Kantor Gubernur Sumatera Barat pada tanggal 14 November 2023 dan mendapatkan juara 3.





Menu lomba Pengolahan Pangan Sehat Anak Tingkat Sekolah Dasar lomba Pangan Got Talent tingkat anak Sekolah Dasar Tingkat Propinsi Sumatera Barat dengan menu Tuna sereh bola-bola kacang merah (Tuna Sereh Bolkamer).



Mengikuti lomba Pengolahan Sosialisasi Gerakan Sadar Pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) untuk Pencegahan dan Penurunan Stunting Tahun 2023 di Hannah Hotel Painan pada tanggal 14 Desember 2023.





Tahun 2023 Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan memfasilitasi bantuan Hibah Kegiatan Pengembangan KRPL (Kawasan Rumah Pangan Lestari) untuk 9 (sembilan) kelompok Wanita Tani yang bersumber dari Dana APBD Dinas Pangan Sumatera Barat yang tersebar di 6 kecamatan.



b. Program Penanganan Kerawanan Pangan

Program ini bertujuan untuk menyediakan pangan bagi masyarakat miskin yg terkena rawan pangan transien sehingga menjamin pasokan pangan yang stabil.

Pagu Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 294.999.576,- dengan Realisasi sebesar Rp. 240.448.355,- . Program ini terdiri dari 2 kegiatan dan 3 Sub Kegiatan.

I. Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Kecamatan , kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan

- a) Penyusunan Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan. Sub kegiatan ini bertujuan ketersediaan Informasi ketahanan pangan yang akurat, komprehensif dan tertata dengan baik. Pagu Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 36.999.820,- dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 29.908.295,- atau 80,83 %, keluaran dari sub kegiatan ini adalah Dokumen Peta Ketahanan Pangan (FSVA).

Rapat Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan



II. Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/kota , terdiri dari 2 Sub Kegiatan

- a) Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota. Sub Kegiatan ini bertujuan untuk mengantisipasi dampak kerawanan pangan pada balita stunting dan ibu menyusui, Pagu Anggaran Pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 95.999.926 ,- dengan Realisasi Sebesar Rp. 88.930.555,- atau 92,64 %. Pada Sub Kegiatan ini

Strategi yang dilakukan untuk mencapai sasaran strategis adalah:

1. penguatan system kewaspadaan pangan dan gizi.
 2. penyaluran pangan bergizi untuk daerah rentan rawan pangan dan berdampak bencana
 3. Pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan
 4. Peningkatan aksesibilitas pangan bagi Masyarakat dari wilayah surplus ke wilayah defisit.
 5. Perluasan akses informasi kerawanan pangan dan gizi.
- b) Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang mencakup 1(satu) daerah Kabupaten/Kota. Sub kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan dan menyalurkan cadangan pangan berupa beras bila kondisi darurat, Pagu Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 161.999.828,- dengan Realisasi sebesar Rp. 121.609.505,- atau 75,07 %.
- Penyaluran Cadangan Pangan (CPP) pada tahun 2023 adalah sebesar 7.890 Kg dari CPP yang tersedia sebesar : 55.696,75 Kg. Penyaluran digunakan untuk bantuan banjir untuk keperluan dapur umum.

Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk daerah rawan Pangan



penyaluran cadangan pangan Pemerintah daerah



Pengadaan beras Cadangan Pangan Pemerintah 8 Ton



Monitoring dan Evaluasi Kegiatan penyaluran Cadangan Pemerintah CBP





3.3.2 Perbandingan dengan Standar Nasional

Perbandingan realisasi kinerja dengan propinsi dan Nasional dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.12
Perbandingan Realiasi Kinerja dengan Propinsi dan Nasional

Indikator Kinerja	Kabupaten				Propinsi				Nasional			
	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	81,7	80,4	86,9	88,9	86,00	83,60	89,8	90,5	86,30		92,9	94,00

Sasaran 4

Meningkatkan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan

Indikator yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis 4 ini terdiri dari 1 (satu) Indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.13
Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan	Rupiah	Rp. 85.885.000.000	Rp. 86.735.261.500	100,99
<i>Rata-rata Capaian</i>					100,99

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja yaitu nilai tambah produk hasil perikanan (rupiah) di mana dalam upaya pencapaiannya di dukung oleh Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan.

Formulasi :

“ Nilai Tambah = harga produk segar – harga produk olahan”

Indikator Kinerja nilai tambah produk hasil perikanan (rupiah) ini dapat di hitung dengan berapa harga produk segar dikurang dengan harga produk olahan. Dilihat dari target indikator Rp. 85.885.000.000,- yang terealisasi Rp. 86.735.261.500,- dengan capaian sasaran strategis 100,99 %.

1. Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2023

Perbandingan antara target kinerja dengan realisasi kinerja pada tahun 2023 tersebut tertuang pada tabel berikut ini:

Tabel 3.14
Hasil Pengukuran antara Realisasi, Target Kinerja dan Indikator Kinerja Sasaran 4

No	Sasaran	Indikator	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian 2023
1.	Meningkatnya Daya Saing Sektor unggulan	Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan	85.885.000.000	86.735.261.500	100,99

Dasar Perhitungan :

$$\begin{aligned} \% \text{ Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{86.735.261.500}{85.885.000.000} \times 100\% \\ &= 100,99\% \end{aligned}$$

2. Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya

Pencapaian target kinerja sasaran Meningkatkan Daya Saing Sektor unggulan dengan indikator Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan selama 4 (empat) tahun terakhir dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 3.15
Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya Tahun 2020 s/d 2023

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Capaian (%)			
	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan	147.357.571,725	153.101.348.000	149.579.005.538	85.885.000.000	131.052.950.000	85.694.112.500	85.126.892.500	86.735.261.500	88,94	55,97	56,91	100,99

Tabel 3.16
Capaian Indikator Kinerja Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan
Tahun 2022 s/d 2023

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target (Rp)		Realisasi (Rp)		Capaian (%)	
			2022	2023	2022	2023	2022	2023
1.	Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan	Rupiah	149.579.005.538	85.885.000.000	85.126.892.500	86.735.261.500	56,91	100,99

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi indikator kinerja sasaran strategis 4 pada tahun 2022 sebesar Rp. 85.126.892.500,- dari target Rp. 149.579.005.538,- atau dengan capaian 56,91 %. Hal ini merupakan dampak dari pandemi covid-19 hingga sekarang, dua tahun belang diberbagai sektor kehidupan mengalami dampak yang cukup signifikan, terutama pada industri, maupun UMKM yang mengakibatkan turunnya realisais nilai tambah produk hasil perikanan. Hal inilah yang mendasari penurunan target Nilai Tambah Hasil Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan di tahun 2023 yaitu menjadi Rp. 85.885.000.000,-.

3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Mengingat upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Pelaku usaha pengolah dan pemasar (Poklahsar) di Kabupaten Pesisir Selatan mendapatkan bantuan-bantuan dari Pemerintah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), APBD Provinsi Sumatera Barat maupun APBD Kabupaten Pesisir Selatan. Sehingga pertumbuhan usaha pengolah dan pemasar (Poklahsar) mulai bergeliat kembali dan berpengaruh baik terhadap pencapaian target nilai tambah produk hasil perikanan yaitu 100,99 % atau naik dari target Rp. 85.885.000.000,- menjadi Rp. 86.735.261.500,-

Bantuan-bantuan yang diberikan oleh Pemerintah antara lain:

- a) Bedah Unit Pengolahan Ikan
- b) Rehabilitasi Pasar Ikan
- c) Bantuan Sarana Pengolahan (contoh: mesin pengolah bakso)

- d) Bantuan Sarana Pengeringan Ikan (contoh: para-para dan bak perebusan ikan)
- e) Bantuan Sarana Penyimpanan Bahan Baku (contoh: chest freezer dan fish box)
- f) Bantuan Sarana Pemasaran Ikan (SPG Roda 3).

4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan /kegagalan

Berdasarkan analisis terdapat keselarasan dalam pencapaian target pernyataan kinerja untuk program/kegiatan yang mendukung pada sasaran 4. Dinas Perikanan dan Pangan pada tahun 2023 melaksanakan 3 program sebagai berikut :

Tabel 3.17
Program Kegiatan yang Mendukung Sasaran Strategis 4

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Pengelolaan Perikanan Tangkap	5.731.273.922	5.236.185.649	91,36
2.	Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.728.272.760	1.559.543.420	90,24
3.	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	2.164.893.823	1.925.820.040	88,96
	Jumlah	9.624.440.505	8.721.549.109	90,62

Pada tataran inilah konsep hilirisasi dan industrialisasi harus dijadikan arus utama pengembangan perekonomian daerah. Karena itu, ke depan pemerintah daerah akan mendorong terwujudnya keterpaduan antara upaya peningkatan produksi budidaya dengan peningkatan produk-produk turunannya yang bernilai ekonomi lebih tinggi.

Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis 4 didukung oleh indikator kinerja produksi perikanan baik produksi budidaya maupun produksi tangkap, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada table dibawah ini.

Tabel 3.18
Jumlah Produksi Perikanan Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Jumlah Produksi Perikanan	Ton	49.819	72.894,99	162,66
<i>Rata-rata Capaian</i>					162,66

Realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan Jumlah Peningkatan Produksi Perikanan (Produksi Perikanan Budidaya dan Produksi Perikanan Tangkap).

Formulasi Peningkatan Produksi Perikanan ini adalah :

$$\text{Produksi Perikanan} = \text{Jumlah Produksi Tahun } (n)$$

Capaian indikator persentase Peningkatan Produksi Perikanan ini diperoleh datanya dari produksi perikanan tangkap dan produksi perikanan budidaya, yang dikelola oleh Bidang Perikanan Budidaya dan Bidang Pemberdayaan Nelayan. Produksi Perikanan pada tahun 2023 target sebesar 49.819 ton, dengan realisasi 72.895 ton (162,66 %).

Tabel 3.19
Capaian Indikator Kinerja Jumlah Produksi Perikanan Tahun 2022 dan Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	
			2022	2023
1.	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	14.278	14.490
2.	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	35.907	58.404,99
	Jumlah		50.185	72.894,99

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Produksi Perikanan ini terdiri dari produksi perikanan Budidaya dan produksi perikanan tangkap. Dapat juga disimpulkan bahwa Capaian kinerja produksi perikanan budidaya terjadi peningkatan dari tahun 2022 ke tahun 2023 sebesar 1,48 % begitu juga dengan produksi perikanan tangkap dari tahun 2023 terjadi peningkatan dari tahun 2022 sebesar 62,66 %. Keberhasilan ini didukung oleh kondisi new normal ditengan pandemic Covid 19 yang memungkinkan aktifitas pelaku usaha 20rikanan mulai berjalan normal.

Tabel 3.20
Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya Tahun 2020 s/d 2023

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Capaian (%)			
	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	16.763	12.618	13.250	13.913	12.018	14.092	14.278	14.490	71,69	111,68	107,76	104,15
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	44.440	35.549	35.727	35.906	35.480	35.549	35.907	58.405	79,84	100	100,50	162,66

Capaian Sasaran strategis 4 didukung oleh Beberapa Program yaitu:

a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Kegiatan ini bertujuan untuk Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Pemberdayaan Usaha Pembudidayaan Ikan Skala Kecil Perikanan ini juga penentu dalam peningkatan Produksi Perikanan sebab tanpa didukung oleh sarana prasarna yang cukup maka dapat mempengaruhi Produksi Perikanan. Pagu Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 5.731.273.922,- dengan realisasi Rp. 5.236.185.649,- dan didukung 2 (dua) Sub kegiatan berikut ini:

1. Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil.

Sub Kegiatan ini bertujuan penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap yang bersumber dari Dana DAK dan APBD/APBD-P Pagu anggaran sub Kegiatan ini Rp. 5.706.273.997,- dengan realisasi anggaran Rp. 5.235.202.249,- atau 91,74 %, rincian pelaksanaan :

a. Sumber Dana DAK

- Pengadaan Perahu Jukung 14 Paket
- Pengadaan Mesin 15 PK 24 Paket
- Pengadaan Alat Penangkap Ikan 122 Paket

b. Sumber Dana APBDP

- Pengadaan Mesin Tempel 15 PK 26 Unit
- Pengadaan Mesin Tempel 40 PK 20 Unit
- Pengadaan Mesin Long Tail 13 Unit
- Pengadaan Jaring Millenium 57 Piece
- Pengadaan Komputer (PC) 2 Unit
- Pengadaan Printer 3 Unit
- Pengadaan GPS 3 Unit
- Pengadaan AC 1 unit
- Scanner 1 Unit

Dokumentasi Kegiatan melalui Dana Alokasi Khusus



Dokumentasi Kegiatan melalui APBDP TA 2023





2. Pelaksanaan Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk Pelayanan TPI Pagu Anggaran Sub kegiatan ini sebesar Rp. 24.999.925,- dan terealisasi sebesar Rp. 983.400,- atau 3,93 %. Hambatan dan kendala realisasi kecil karena sertifikasi tanah tidak bisa terlaksanakan karena lokasi yang direncanakan tidak sesuai secara teknis.

b. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya baik diperairan umum atau kolam, Pagu anggaran program ini bersumber dari Dana DAK yakni sebesar Rp. 1.728.272.760,- dengan realisasi anggaran Rp. 1.559.543.420.- yang terdiri dari 1 kegiatan dan 1 Sub Kegiatan sebagai berikut :

i. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan produksi perikanan Budidaya , yang terdiri dari 1 Sub Kegiatan .

1. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. Sub Kegiatan ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), yang bertujuan Meningkatkan Produksi Perikanan, Pendapatan dan Kesejahteraan Kelompok Pembudidaya, Pagu Anggaran Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 1.728.272.760,- dengan realisasi anggaran Rp. 1.559.543.420.- atau 90.24 %,

Pelaksanaan kegiatan ini dengan rincian :

a. Sumber Dana DAK

- Belana Modal Alat Pengujian Kualitas Air 1 Unit
- Pengadaan Calon Induk Unggul Ikan Lele Betina 56 ekor dan jantan 50 ekor.
- Pengadaan Pakan Calon Induk Unggul Ikan 1.990 Kg
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Nila : 3 Paket
- Pengadaan sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Lele : 3 Paket
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Gurame : 12 Paket

Kegiatan yang dilakukan di BBI Pincuran Boga yaitu melaksanakan kegiatan pembenihan mulai dari pemeliharaan induk, pemijahan, penetasan telur, pendederan dan panen benih untuk di jual. Selain untuk dijual ada juga yang didistribusikan untuk bantuan – bantuan berdasarkan proposal yang masuk ke Dinas Perikanan dan Pangan.

a) Bantuan yang diserahkan ke masyarakat Bantuan Benih Ikan Nila sebanyak 79.950 ekor yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan.

b) Penjualan Benih Ikan Nila sebanyak 12.375 ekor sebagai realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 5.445.000,-.

Bantuan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Perikanan Budidaya terdiri dari :

➤ Bantuan Benih dan Pakan Ikan Nila diserahkan kepada kelompok penerima seperti yang ditampilkan dalam tabel.

NO	JENIS KEGIATAN	LOKASI		TITIK KOORDINAT
		KECAMATAN	NAGARI	
1	Pokdakan Sakato Indah Tanjung Kandis	Batang Kapas	Nagari Taluak Tigo Sakato Kecamatan Batang Kapas	LS 1°34'50" BT 100°39'16"
2	Pokdakan Mina Abadi Bukit Pulai	Batang Kapas	Nagari IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas	1,4800733 S 100,6530399 E
3	Pokdakan Pila Jaya	Ranah Pesisir	Nagari Sungai Tunu Barat Kecamatan Ranah Pesisir	1,41929°S 100,60004° E

Dokumentasi Bantuan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Nila



- Bantuan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Lele diserahkan kepada kelompok penerima seperti yang ditampilkan dalam tabel

NO	JENIS KEGIATAN	LOKASI		TITIK KOORDINAT
		KECAMATAN	NAGARI	
1	Pokdakan Maju Bersama Surantih	Sutera	Nagari Surantih Kecamatan Sutera	-1,593373° S 100,648298° E
2	Pokdakan Swakarsa Tandikek	Sutera	Kampung Koto Tarok Nagari Amping Parak Kecamatan Sutera	1,6151550° S 100,6892366° E
3	Pokdakan Lembah Alam Bukik Pulakek	Lengayang	Nagari Lakitan Selatan Kecamatan Lengayang	1,74030° S 100,75797° E

➤ Dokumentasi Pengadaan Sarana dan Prasarana Ikan Lele



➤ Bantuan Sarana dan Prasarana Ikan Gurame diserahkan kepada kelompok penerima seperti yang ditampilkan dalam tabel

NO	JENIS KEGIATAN	LOKASI		TITIK KOORDINAT
		KECAMATAN	NAGARI	
1	- Pokdakan Lagan Sepakat	Lengayang	Nagari Lakitan Selatan Kecamatan Lengayang	Lat -1.853372°S Long 100.865964° E
2	- Pokdakan Koto Pandan Jaya	Airpura	Nagari Inderapura Timur Kecamatan Airpura	Lat -2.0506899°S Long 100.9575649° E
3	- Koperasi Produsen Cahaya Air Pilah	Airpura	Nagari Pulau Rajo Inderapura Kecamatan Airpura	-2°2'17,958"S 100°54'40,686"E
4	- Pokdakan Talang Kayu Pasak	Pancung Soal	Nagari Simpang Lima Inderapura Kecamatan Pancung Soal	-2°3'52,10762"S 100°57'48,78483"E

5	- Pokdakan Gemuruh Lebak Paku	Pancung Soal	Nagari Inderapura Selatan Kecamatan Pancung Soal	-2°3'3,67261"S 101°1'21,91832"E
6	- Pokdakan Batang Air Panambam	Pancung Soal	Nagari Inderapura Kecamatan Pancung Soal	Lat -2,070703°S Long 100,972043°E
7	- Pokdakan Mitra Sejahtera Tigo Sungai	Pancung Soal	Nagari Tigo Sungai Inderapura Kecamatan Pancung Soal	Lat -2,04705396° S Long 100.99920939 E
8	- Pokdakan Para Setia	Pancung Soal	Nagari Tluk Amplu Inderapura Kecamatan Pancung Soal	-2°5'17,214"S 100°54'44,01"E
9	- Pokdakan Ayia Tejun Balenggek	Pancung Soal	Nagari Inderapura Kecamatan Pancung Soal	-2°3'29,13484"S 100°57'23,54256"E
10	- Pokdakan Talun Indah	Pancung Soal	Nagari Inderapura Selatan Kecamatan Pancung Soal	Lat -2.050816° S Long 101.021947° E
11	- Pokdakan Beringin Jaya Kudo-kudo	Pancung Soal	Nagari Kudokudo Inderapura Kecamatan Pancung Soal	-2°3'13" S, 100°58'7" E
12	- Pokdakan Batang Sumber Terarah	Basa Ampek Balai Tapan	Nagari Batang Arah Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan	-2°9'35,40312" S 101°5',16584" E

➤ Dokumentasi Pengadaan Sarana dan Prasarana Ikan Gurame







- c. Program ini bertujuan untuk peningkatan produk perikanan yang berdaya saing dengan cara meningkatkan nilai tambah produk perikanan dan meningkatnya nilai konsumsi ikan. Pagu anggaran program ini Rp. 2.164.893.823,- dengan realisasi anggaran Rp. 1.925.820.040,-.

Program ini didukung dengan 2 kegiatan dan 2 Sub Kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

- I. Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil.
 1. Pelaksanaan bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil. Sub kegiatan bertujuan untuk meningkatkan profuksi

dan variasi produk olahan ikan serta menjamin keamanan produk hasil perikanan, Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 2.024.893.898,- dengan Realisasi Rp. 1.788.408.879,- atau 88,32 %,dengan rincian kegiatan:

- Rehabilitasi Pasar Ikan sebanyak 3 Unit
- Bedah UPI Skala Kecil (Perbaikan Bangunan beserta Perlatan pendukung (dana DAK) sebanyak 3 Unit.

1) Poklamsar Setia Murni Kecamatan Linggo Sari Baganti



2) Poklamsar Saudaro Basamo Kecamatan Sutera





3) Poklamsar Randang Ega Kecamatan IV Jurai



Rehabilitasi Pasar ikan melalui DAK Fisik Penugasan TA 2023.

1. Pasar Ikan Pasar Barung-Barung Balantai Kecamatan Koto XI Tarusan





2. Pasar Ikan Pasar Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti



3. Pasar Ikan Pasar Sago Kecamatan IV Jurai





II. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1(satu) Kabupaten/Kota

1. Pemberian fasilitasi bagi pelaku usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. Sub Kegiatan ini bertujuan untuk mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk gemar makan ikan yang dimulai dari masa ibu hamil (Bayi dalam Kandungan). Mengingat ikan memiliki komposisi nutrisi yang sangat baik untuk kesehatan, kecerdasan dan pertumbuhan serta mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya nelayan, pembudidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan melalui peningkatan rata-rata konsumsi ikan.

Pagu Anggaran setelah refocusing sebesar Rp. 139.999.925,- dan terealisasi sebesar Rp. 137.411.161,- atau 98,15 %, kegiatan pada Sub kegiatan ini berupa Lomba Masak Serba ikan Tingkat Kabupaten, Propinsi dan Pusat dan Forikan.

Lomba masak serba ikan tingkat Kabupaten Pesisir Selatan.



Lomba masak serba ikan tingkat Propinsi Sumatera Barat.





Menghadiri Rakor Forikan dan Hari Ikan Nasional



Lomba penilaian program forikan Kabupaten/Kota



Sosialisasi Gemarikan



3.3.2 Perbandingan dengan Standar Nasional

Perbandingan realisasi kinerja jumlah produksi perikanan dengan propinsi dan Nasional.

Tabel 3.21
Perbandingan Realiasi Kinerja dengan dengan Propinsi dan Nasional

Tahun	Perikanan Tangkap			Perikanan Budidaya		
	Kabupaten	Propinsi	Nasional	Kabupaten	Propinsi	Nasional
2020	35.372,38	229.027	7.722.095	12.017,85	276.912	15.306.403
2021	35.549	193.822,92	6.988.208	14.091	361.833,15	14.845.015
2022	35.906	193.822,92	N/A	14.277	260.044,61	N/A
2023	58.405			14.490		

3.4 Realisasi Anggaran

Anggaran dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjang pencapaian 4 (empat) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023, tercantum pada tabel 3.21.

Tabel 3.22
Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Yang Menunjang
Sasaran Strategis

NO.	SASARAN STRATEGIS	TAHUN 2022		
		ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
		(Rp.)	(Rp.)	(%)
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	4.888.537.459,-	4.683.272.630,-	95,80
2.	Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin	464.999.595,-	399.946.867,-	86,01
3.	Meningkatnya Daya Saing Sektor Unggulan	9.624.440.505,-	8.721.549.109,-	90,62
4.	Meningkatkan Kualitas Inovasi Daerah	-	-	-
TOTAL		14.977.977.559,-	13.804.768.606,-	92,17

Dari tabel 3.13 diatas dapat dijelaskan bahwa plafon anggaran yang disediakan pada Dinas Perikanan dan Pangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 untuk menunjang pencapaian 4 (empat) sasaran strategis

yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 sebesar Rp. 14.977.977.559,- terealisasi sebesar Rp. 13.804.768.606,- atau 92,17%.

BAB IV PENUTUP

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya.

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa kinerja, Capaian Kinerja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2023, yaitu:

a. Capaian Sasaran

Dari 4 (empat) sasaran strategis, 3 (tiga) sasaran strategis dengan capaian melebihi target yaitu pada sasaran strategis Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin yaitu 108,41% dan Meningkatnya Daya Saing Sektor Unggulan 100,99%. Sedangkan sasaran strategis yang terendah yaitu peningkatan kualitas inovasi daerah yaitu dengan nilai 63,

b. Capaian Indikator

Dinas Perikanan dan Pangan mempunyai 4 (empat) Indikator kinerja sasaran pada tahun 2023. Capaian masing-masing indikator kinerja yaitu

1. Nilai AKIP dengan kategori A (80,97),
 2. Nilai Kematangan Inovasi Daerah 63,
 3. Pencapaian Skor PPH (Pola Pangan Harapan) 88,9 (108,41%) dan
 4. Nilai tambah produk hasil perikanan Rp. 86.735.261.500,- (100,99 %).
- Dengan rata-rata capaian total 93,10 %.

c. Capaian Realisasi Anggaran Dalam Mendukung Pencapaian Sasaran

Untuk menunjang pencapaian 4 (empat) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada Dinas Perikanan dan Pangan pada Tahun Anggaran 2023 adalah Rp. 14.977.977.559,- dengan realisasi sebesar Rp. 13.804.768.606,- atau 92,17%.

d. Langkah-langkah yang dilakukan untuk peningkatan kinerja

Untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian kinerja dan realisasi anggaran, maka dilakukan upaya-upaya, antara lain :

- 1) Perlunya keseriusan Dinas Perikanan dan Pangan dalam mendorong inovasi, karena penyelenggaraan Inovasi Daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik; pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan peningkatan daya saing daerah.
- 2) Kerjasama yang baik dengan stakeholder terkait sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan karena pencapaian target kinerja tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja.
- 3) Perlu adanya sinergisitas pelaksanaan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.
- 4) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan secara rutin untuk bahan perbaikan di masa yang akan datang.
- 5) Melakukan sinkronisasi kegiatan antar Organisasi Perangkat Daerah agar kegiatan bersifat terpadu dan terfokus kepada satu kawasan.

4.2 Saran

Dalam meningkatkan pencapaian kinerja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, maka akan dilakukan :

1. Mensinkronkan perencanaan program dan kegiatan serta antisipasinya sehingga tidak akan mengalami permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaannya.
2. Mengoptimalkan pencapaian sasaran strategis kinerja program dan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan setiap tahunnya.
3. Perlunya peningkatan kompetensi Sumberdaya ASN Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan baik bidang perikanan maupun bidang pangan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2023 ini dibuat, semoga dapat berguna sebagai bahan evaluasi serta pedoman dalam pelaksanaan tugas selanjutnya. Diharapkan dapat menambah informasi/data penting dalam pengambilan keputusan dan kebijakan lebih lanjut terutama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan di tahun berikutnya.

Painan, Januari 2024

Kepala Dinas Perikanan dan Pangan
Kabupaten Pesisir Selatan



FIRDAUS, S.Pi

NIP. 19700621 199303 1006